



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT KERJA KOMISI V DPR RI  
DENGAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI**

- Tahun Sidang : 2022-2023  
Masa Persidangan : I  
Rapat Ke- :  
Jenis Rapat : Raker  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Kamis, 25 Agustus 2022  
Waktu : Pukul 10.10 s.d. 14.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)  
Gedung Nusantara DPR RI dan Secara Virtual *Zoom Cloud Meeting*
- Ketua Rapat : Lasarus, S.Sos., M.Si (F-PDIP) – Ketua Komisi V DPR RI
- Acara : 1. Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021;  
2. Realisasi APBN TA.2022 sampai dengan bulan Agustus 2022;  
3. Membahas RKA K/L TA.2023 Kementerian PUPR dalam Nota Keuangan RAPBN TA. 2023;  
4. Membahas usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi.
- Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:  
49 dari 55 orang Anggota dengan rincian:  
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)  
10 dari 11 orang Anggota  
1. Lasarus, S.Sos., M.Si.  
2. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.  
3. Mochamad Herviano  
4. Sukur H. Nababan, S.T.  
5. Ir. Sudjadi  
6. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.  
7. Sri Rahayu  
8. H. Irmadi Lubis  
9. Ir. Effendi Sianipar  
10. Harvey B. Malaihollo  
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)  
8 dari 8 orang Anggota  
1. Ir. Ridwan Bae

2. Drs. Hamka B Kady, M.S.
  3. Cen Sui Lan
  4. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.
  5. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.
  6. Ilham Pangestu
  7. Muhammad Fauzi, S.E.
  8. Ir. H. Anang Susanto, M.Si.
3. FRAKSI PARTAI GERINDRA  
(F-GERINDRA)  
6 dari 7 orang Anggota
1. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.
  2. Sudewo, S.T., M.T.
  3. Iis Rosyita Dewi, S.Hum., M.M.
  4. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
  5. Drs. H. Mulyadi, M.MA.
  6. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M.
4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)  
6 dari 6 orang Anggota
1. Roberth Rouw
  2. Drs. H. Tamanuri, M.M.
  3. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.
  4. Drs. H. Soehartono, M.Si.
  5. Sri Wahyuni
  6. Drs. Fadholi, M.Ikom.
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN  
BANGSA (F-PKB)  
6 dari 6 orang Anggota
1. H. Ruslan M. Daud
  2. H. Irmawan, S.Sos., M.M.
  3. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
  4. Sofyan Ali, S.H.
  5. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
  6. H. Syafiuddin, S.Sos.
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)  
5 dari 5 orang Anggota
1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
  2. H. Mohamad Muraz, S.H., M.M.
  3. drh. Jhonni Allen Marbun, M.M.
  4. Lasmi Indaryani, S.E.
  5. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.
7. FRAKSI PARTAI KEADILAN  
SEJAHTERA (F-PKS)  
2 dari 5 orang Anggota

1. H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.
2. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

4 dari 5 orang Anggota

1. H.A. Bakri H. M., S.E.
2. Athari Ghauthi Ardi
3. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
4. H. Boyman Harun, S.H.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

2 dari 2 orang Anggota

1. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., MS.
2. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI (Dr. Ir. Mochamad Basuki Hadimoeljono, M.Sc.)

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT/ F- PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:**

Baik.

Kita mulai rapat kita pada pagi, siang hari ini.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,  
Yang terhormat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta seluruh jajarannya,  
Hadirin yang berbahagia,**

Mengawali rapat kerja kita pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan perkenannya lah kita dapat berkumpul pada pagi, siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat.

Rapat ini dihadiri baik secara fisik maupun virtual, yang menurut informasi dari Sekretariat, hadir sebanyak 38 Anggota. 18 orang hadir secara fisik dan 20 hadir secara virtual dari 8 unsur fraksi yang berbeda. Maka sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Peraturan DPR RI Tentang Tata Tertib, rapat ini sudah memenuhi kuorum. Dan, izinkanlah saya membuka rapat kerja pada hari ini dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) rapat kerja pada hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.10 WIB)**

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta seluruh jajarannya. Terima kasih Pak Menteri, sudah hadir di undangan kami secara fisik pada rapat hari ini.

**Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,  
Pak Menteri yang kami hormati,**

Berdasarkan Surat Badan Anggaran mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun 2021 dan Pembahasan RUU Tentang APBN Tahun 2023 maka hari ini Komisi V DPR RI melaksanakan raker dengan mitra kerjanya dengan agenda membahas laporan keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun 2021 dan realisasi APBN Tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2022 dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2023. Pada hari ini kita dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat baik usulan-usulan dari komisi maupun yang sumbernya dari APBN murni dan juga yang terkait dengan dana alokasi khusus.

Sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pada Pasal 98 ayat (2) dan (3) serta Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Pasal 59 ayat (2) dinyatakan bahwa tugas komisi dalam bidang anggaran meliputi di antaranya, membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja komisi dan mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP Tahun 2021. Serta Realisasi Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP Tahun 2021, Kementerian PUPR mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Kita kasih *applause* lah, selamat Pak Menteri untuk seluruh jajarannya dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

- Sedangkan Realisasi Anggaran Tahun 2022 sampai dengan Agustus sebesar 41.07%.
- Sementara terkait dengan dana alokasi khusus (DAK) afirmasi dan reguler, kami perlu mendapat penjelasan secara komprehensif pada kesempatan yang berbahagia ini.

Terkait dengan agenda berikutnya yaitu pembahasan RKA K/L Kementerian PUPR pada Tahun Anggaran 2023 perlu kiranya kita bangun

kesepakatan bersama bahwa rapat kerja pada hari ini merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2023 yang telah kita laksanakan pada bulan Juni 2022 yang lalu.

Dalam RAPBN Tahun 2023, Kementerian PUPR memperoleh anggaran sebesar 125,22 Triliun yang akan digunakan untuk melanjutkan kegiatan prioritas termasuk penyelesaian proyek strategis nasional yang utamanya untuk mendukung ketahanan pangan, konektivitas, dan pembangunan infrastruktur dasar IKN. Berdasarkan kegiatan prioritas tersebut antara lain:

1. Pembangunan (suara kurang jelas) bendungan.
2. Pembangunan irigasi seluas 6.900 Hektar.
3. Pembangunan pengendali banjir sepanjang 62,75 Km.
4. Pembangunan jalan sepanjang 489,1 Km.
5. Pembangunan peningkatan SPAM dengan kapasitas 2.206 L/detik, yang berikutnya
6. Pembangunan rumah susun sebanyak 4.575 unit.

Demikian, pengantar rapat pada pagi hari ini, siang hari ini, selanjutnya sesuai dengan *rundown* rapat. Saya persilakan kepada yang terhormat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyampaikan paparan sesuai dengan materi dalam undangan rapat pada hari ini.

Dengan hormat, kami persilakan.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc.):**

Terima kasih, Bapak Ketua Komisi V DPR RI,

**Bapak Pimpinan Komisi V DPR RI,  
Ibu-Bapak Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat dan kami hormati,**

Sebelum kami menyampaikan laporan lengkapnya, pertama kami mohonkan izin Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Bina Konstruksi, nggak bisa, tidak bisa mengikuti hari ini, sedang isoman. Yang kedua, ini juga kami perlu laporkan pada jam yang sama sebetulnya ada sidang kabinet tentang digitalisasi pengadaan barang dan jasa. Tapi, selama ini kan Komisi V selalu fleksibel dengan acara kami, hari ini kami fleksibelkan untuk ke Komisi V. Jadi, ini saya kira ini perlu kami laporkan supaya ada kesepakatan bersama.

**Ibu-Bapak sekalian yang terhormat dan kami hormati,**

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan, ada empat laporan yang ingin saya sampaikan yaitu sesuai dengan undangan yaitu laporan keuangan, hasil auditing BPK untuk PUPR Tahun Anggaran 2021, Realisasi APBN Kementerian PUPR Tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022. Kemudian RKA K/L Tahun 2023 yang termasuk dalam nota keuangan RAPBN Tahun 2023 dan usulan program-program yang akan didanai oleh DAK.

Yang pertama tentang laporan keuangan Kementerian PUPR, APBN Tahun 2021. Dalam penyusunan laporan keuangan Kementerian PUPR Tahun 2021 Kementerian PUPR telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut;

1. Pengungkapan pada laporan keuangan atas realisasi kegiatan penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC PEN) sebesar untuk pandemi, yang pertama adalah 873,18 Miliar dan yang kedua 51,23 Triliun untuk PEN-nya, yang dilaksanakan melalui kegiatan padat karya, mendukung ketahanan pangan, dukungan terhadap destinasi pariwisata, kawasan-kawasan industri, dan kegiatan *information and communication technology* yang semuanya, hampir semuanya kita lakukan dengan mengutamakan padat karya.
2. Pengungkapan pada laporan keuangan atas realisasi kegiatan pencegahan *stunting* terhadap Ibu hamil dan anak Indonesia sebesar 916 Miliar, melalui kegiatan pencegahan dengan pembangunan infrastruktur air minum dan penyediaan sanitasi yang layak.
3. Pencatatan dan Penyajian Aset Tanah (PSN) yang dibiayai oleh LMAN (Lembaga Manajemen Aset Nasional Negara) sebesar 21,7 Triliun serta kapitalisasi aset Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) sebesar 38,45 Triliun ke dalam aset induknya.
4. Pencatatan dan penyajian aset yang berasal dari likuidasi Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BWS) sebanyak 3.686 (suara kurang jelas) dengan nilai sebesar 1,13 Triliun yang diikuti dengan penetapan status penggunaan barang milik negara.
5. Pencatatan dan pengungkapan nilai investasi konsesi jasa pada Kementerian PUPR per 31 Desember 2021 sebesar 474,15 Triliun dengan jumlah aset konsesi sebesar 395,05 Triliun.
6. Sesuai surat Ketua BPK RI Nomor 89/S/1/08/Tahun 2020 Tanggal 10 Agustus 2020 dan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-189/PB/2021, Tanggal 13 Juli 2021 untuk keterbukaan informasi publik. Maka laporan keuangan Kementerian PUPR Tahun 2021 *audited* telah dipublikasikan pada surat kabar harian bisnis tanggal 1 Agustus Tahun 2022.

Yang kedua, untuk Laporan Keuangan Tahun 2021 ini, temuan dan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun 2021 sebagai berikut:

- A. Jumlah temuan dan rekomendasi dalam LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun 2021 sebanyak 32 temuan dan 101 rekomendasi dengan nilai 89,76 Miliar sekitar 0,06% dari Pagu Kementerian PUPR Tahun 2021 sebesar 161,31 Triliun.
- B. Tindak lanjut hasil temuan dan rekomendasi atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan adalah dengan

diterbitkannya instruksi Menteri PUPR Nomor PW0202MN/1306 Tanggal 18 Juli 2022 dengan muatan pokok sebagai berikut;

- Menyampaikan tindak lanjut atas RHP selambat-lambatnya 5 September 2022 kepada Sekjen Kementerian PUPR.
  - Memberikan teguran kepada kuasa pengguna anggaran atau satker (satuan kerja).
  - Memerintahkan unit kepatuhan intern untuk melakukan pendampingan dan pengawalan proses tindak lanjut tersebut.
  - Gambaran Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun 2021;
1. Nilai aset Kementerian PUPR per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1962,8 Triliun.
  2. Realisasi belanja Kementerian PUPR per 31 Desember 2021 sebesar 152,7 Triliun dari Pagu Anggaran sebesar 161 Triliun atau sebesar 94,7%.
  3. Realisasi pendapatan Kementerian PUPR per 31 Desember 2021 sebesar Rp744,8 Miliar.

Mutasi aset Kementerian PUPR Tahun 2021 antara lain, sebagai berikut;

1. Kenaikan aset lancar sebesar 20,91 Triliun, sebagian besar disebabkan adanya kenaikan aset Kementerian PUPR untuk diserahkan kepada masyarakat atau Pemda berupa: jembatan gantung, kegiatan arahan Pimpinan Presiden, rehabilitasi jalan KSPN Borobudur, pembangunan jalan di kawasan industri terpadu Batang, *food estate*, serta pembangunan rumah susun dan rumah khusus.
2. Penurunan aset tetap sebesar 21,86 Triliun disebabkan oleh nilai penyusutan dan nilai serah terima aset yang lebih besar dari penambahan aset tetap.
3. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun 2021 Nomor 5B/LHP/17/005/2022 Tanggal 27 Mei 2022 yang diserahkan oleh Anggota IV BPK RI pada tanggal 13 Juli Kementerian PUPR seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

**Bapak Pimpinan,  
Ibu-Bapak Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat dan kami hormati,**

**KETUA RAPAT:**

Izin Pak Menteri, dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Pak Rachmat Gobel.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc.):**

Selamat pagi Bapak, terima kasih Bapak.

Yang kedua, laporan tentang realisasi APBN Tahun 2022 hingga bulan Agustus 2022.

1. Pagu awal Kementerian PUPR Tahun 2022 sebesar 100,59 Triliun, saat ini menjadi 116,37 Triliun. Mengalami penambahan Pagu dengan rincian:
  - Luncuran SBSN 2021 sebesar 2,29 Triliun. Antara lain untuk pembangunan daerah irigasi Selinga, peningkatan daerah irigasi air Manjuntjo, pembangunan jalan, dan jembatan.
  - Percepatan pinjaman hutang luar negeri sebesar 5,01 Triliun antara lain untuk *loan density*, kemudian rehabilitasi irigasi dan juga untuk *tourism* serta *national urban water supply*, serta *national affordable housing program* yang sebagian adalah untuk perumahan.
  - Tambahan tadi dari 100,59 menjadi 116,37 Triliun berasal dari tambahan rupiah murni dari BA 4999 sebesar 8,48 Triliun untuk dukungan pada even internasional sebesar 2,67 Triliun untuk KTT 20 ASEAN Summit, dan MotoGP.
  - Penanganan bencana alam sebesar 710 Miliar di Jawa Timur, Sulawesi Barat, NTT, NTB, dan Banten serta pembangunan IKN sebesar 5,10 Triliun.
  - Penambahan anggaran untuk pembangunan IKN sebesar 5,10 Triliun dialokasikan untuk Dirjen Sumber Daya Air sebesar 110 Miliar, untuk pengendalian banjir dan sanggai, bendungan Sepaku Semoi, dan embung-embung dan 19 embung di kawasan inti pusat Pemerintahan dan *intake* Sungai Sepaku.
  - Yang kedua. Dirjen Bina Marga sebesar 2,11 Triliun untuk pembangunan jalan kerja logistik, pembangunan jalan di dalam KIPP, pelebaran luas jalan dari simpang IHM sampai Simpang Riko dan Jembatan Pulo Balang Bentang Pendek, mohon maaf kami ulangi pelebaran ruas jalan simpang IHM, sampai Simpang Riko, dan pembangunan Jembatan Pulo Balang Bentang Pendek, pembangunan Jalan Tol Duplikasi Jembatan Bentang Pendek Pulo Balang dan jalan *bypass* Pasar Sepaku dan Pembangunan Dermaga.
  - Dirjen Cipta Karya 2,36 Triliun antara lain pembangunan instalasi penjernih air Tahap I, IPAL, persampahan DKIPP, pengembangan kawasan tumbuh kebangsaan, pembangunan Istana Presiden, istana Wakil Presiden, Kantor Kemenko, Kemensetneg dan Kementerian lain serta masjid negara.
  - Dirjen Perumahan sebesar 480 Miliar untuk rumah dinas dan hunian pekerja konstruksi. Jadi, nanti para kontraktor pekerjaannya kita



tempatkan di *tower-tower* rusun yang kita bangun, jadi tidak lagi ada membuat rumah-rumah bedeng-bedeng di sekitar pekerjaan sehingga menjadi kumuh.

- Dirjen Bina Konstruksi manajemen pengadaan barang dan jasa serta pembinaan tenaga kerja konstruksi di IKN. Besok pagi sabtu kami membuka pelatihan untuk warga di Penajam Paser sebanyak 1500 dilakukan pelatihan untuk menjadi tenaga konstruksi.

Yang ketiga, Realisasi Pagu Anggaran per 23 Agustus 2022 adalah sebesar 47,79 Triliun atau 41,07% dari total anggaran dengan progres fisik sebesar 46,94%.

Empat, alokasi anggaran padat karya tunai sebesar 14,35 Triliun dengan progres sebesar 7,83 Triliun atau 54,6% dan serapan tenaga kerja sebanyak 340.159 orang.

### **Ibu-Bapak sekalian yang kami hormati,**

Yang kelima, untuk Realisasi APBN 2022 sampai Agustus, Kementerian PUPR berkomitmen dalam mendukung penggunaan produk dalam negeri melalui barang dan jasa, minimal 90% dari Pagu Anggaran. Hingga pertengahan Agustus 2022 Realisasi Belanja Penggunaan Produk Dalam Negeri sebesar 44,61 Triliun atau 42,99% dari target 103,78 Triliun. Jadi, dari anggaran 116 sekitar 103 Triliun adalah untuk belanja produk dalam negeri sampai dengan Agustus, terealisasi 44 Triliun atau 42, atau 43%.

Keenam, upaya percepatan Realisasi Anggaran Tahun 2022 antara lain:

Pertama, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa paket kegiatan IKN. Jadi, IKN ini Bapak-Bapak sekalian, dari 20 paket pekerjaan konstruksi dan sekitar 30 paket pekerjaan *software*, hari senin besok akan ada penandatanganan kontrak, jadi kita percepa, melakukan penandatanganan kontrak untuk lima kegiatan konstruksi dan beberapa kontrak untuk *software*. Jadi, mulai hari Senin besok kita sudah mulai penandatanganan kontrak, kemudian tanggal 5 September lagi jadi berturut-turut sehingga Tahun 2022 ini akan segera kita mulai pembangunan di IKN.

Yang kedua, mempercepat penyelesaian administrasi dan revisi anggaran termasuk untuk pembangunan IKN, ini untuk revisi anggaran IKN sudah selesai semuanya sehingga kami bisa menandatangani kontraknya.

Yang ketiga, mempercepat pelaksanaan pekerjaan sesuai target dan batas waktu penyelesaian dengan meningkatkan monitoring, menyelesaikan masalah tanah, dan lain-lain.

Empat, mempercepat penyelesaian kegiatan padat karya sesuai dengan target dan sasaran. Ini menjadi prioritas yang diperintahkan oleh Bapak Presiden karena untuk menjaga, untuk mendistribusikan uang ke masyarakat

dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, ini diminta untuk segera padat karya dilakukan. Mempercepat yang tadi sudah ada progresnya sekitar 54,6% akan terus kita tingkatkan.

Dan yang kelima, mempercepat pemanfaatan potensi Pagu tidak terserap untuk program prioritas dan mendesak. Ini juga kami lakukan dengan adanya *mid term review*, raker *mid term review*, kami sudah mengidentifikasi potensi-potensi Pagu yang tidak terserap. Seperti yang Tahun 2021 kita menyerap 94,7%, sehingga masih ada sisa Pagu. *Nah*, itu yang kita manfaatkan untuk di Tahun 2022 ini dari Pagu-Pagu yang seperti itu.

Yang ketujuh, infrastruktur yang telah diresmikan dari Januari hingga Juli 2022. Ini kami ingin melaporkan juga karena ini adalah realisasi APBN. Jadi, infrastruktur apa saja yang sudah diresmikan sampai dengan Juli:

Pertama adalah untuk Bidang Sumber Daya Air, itu Bendungan Randu Gunting di Blora di Jawa Tengah, ini juga dihadiri oleh Pak Komisi V, Anggota Komisi V, Pak Dewo baju biru itu, nggak tahu Pak, kenapa pakai baju biru. Kemudian, Embung Gedong Sambi di Jateng dan Bendungan Bintang Bano di NTB, ini juga dihadiri oleh Anggota Komisi V, Pak Suryadi, *orange* ya. Dan pusat kesenian modern Rumpin di Jawa Barat. Kemudian Embung Semingkir di Jateng, ini sebenarnya ada Pak Komisi V ada hadir di situ. Kemudian untuk di Bina Marga Jembatan Gantung Dirpasang di Jateng dihadiri oleh Pak, apa, kemudian bendungan ya tadi *sorry-sorry*, oke coba lanjut deh bendungan, ulangi-ulangi. Ini Bendungan Ladongi ada Pak Ridwan Bae, disebelahnya Pak.

Iya? Oh iya, itu yang, itu pakai kuning itu konsisten. Jadi, di sebelah Pak Presiden ada Pak Ridwan Bae, kebetulan pakai rompi kuning. Lanjut, Ini *bypass* Balige dihadiri Pak Jhonny Allen, baju biru cocok ini. Lanjut, Ini di jembatan pelosok oleh Ibu Gita, Bu Estu merah cocok, begitu, lanjut, kita hanya lihat konsistensinya saja Pak, oh gitu? Lanjut. Ya, ini jalan lingkaran Brebes-Tegal, Bapak Bambang Hermanto juga sempat hadir di peresmian. Lanjut, Wah ini Pak Dewo lagi ini di Pelindo, makin jelas.

Lanjut, ini di Prapat masih dengan Pak Jhonny Allen. Lanjut, ini Kampung Ulos Hutaraja dan Hutasiagan, Pak, ada Pak Jhonny Allen. Terus, ini kami dengan Bu Estu nanam pohon di Rumah Susun yayasan Bakti Bapak Emak lanjut di Jombang. Ini Ketua DPR Ibu Puan, mengunjungi IKN didampingi oleh Pak Lasarus, jadi kami juga menerima beliau di sana bersama Pak Panglima TNI. Ini Pak Bakri di Jambi pada saat kunjungan Pak Presiden. Atau? Lanjut. *Nah*, dan yang terakhir kemarin Pak Tamliha dan Pak Ridwan Bae ikut *ground breaking* jalan tol Serang-Panimbang, di Banten. Lanjut.

Yang ketiga Bapak, laporan kami adalah tentang RKA/KL mungkin lebih menarik ini Bapak-Bapak. Tahun 2023 dalam Nota Keuangan RAPBN Kementerian PUPR.

Berdasarkan surat bersama Menteri PPN, Kepala Bappenas Nomor B577/M Tahun 2022 dan Menteri Keuangan Nomor S61MK02 tanggal 27 Juli 2022 ditetapkan Pagu Anggaran Kementerian 2023 sebesar 125,22 Triliun.

Termasuk untuk penyelesaian proyek strategis nasional terutama bendungan yang mendukung ketahanan pangan dan penggunaan infratraktur dasar IKN dengan rincian sebagai berikut:

- Dirjen Sumber Daya Air 41,9 Triliun,  
Ini yang maksudnya bendungan adalah penyelesaian 13 bendungan. Jadi, Bapak-Bapak sekalian, kebijakan Pemerintah supaya pembangunan-pembangunan dapat diselesaikan pada Tahun 2023 atau Semester I 2024. Jadi, sehingga apa yang kami punya adalah OPOR itu, Operasi Pemeliharaan Optimalisasi dan Rehabilitasi terhadap infrastruktur yang sudah dibangun. Jadi, kita melakukan pemanfaatan, pengoperasian, kalau masih ada yang belum sempurna kita rehabilitasi kita optimalisasi.
- Dirjen Bina Marga sebesar 49,31 Triliun,
- Dirjen Cipta Karya 25,03 Triliun,
- Dirjen Perumahan 6,97 Triliun, dan
- Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan-badan Direktorat Jenderal, Pembiayaan infrastruktur dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebesar 1,9 Triliun.

Rincian rencana kegiatan per unit organisasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Dirjen Sumber Daya Air sebesar 41,9 Triliun dengan kegiatan antara lain. Saya kira ini hanya antara lain, mungkin nanti detailnya kan ini sudah program jadi mudah-mudahan masih ada RDP untuk memfinalkan program-program Tahun 2023 nanti. Jadi kan, seperti penyelesaian Bendungan Tiga Dihaji di Sumsel, Bener di Jogja, Jeragung, jadi pembangunannya 24 bendungan tapi selesai 13. Jadi, pada Tahun 2023 nanti 24 bendungan dibangun dan 13 di antaranya akan selesai. Kemudian, pembangunan irigasi seluas 6.900 Hektar yaitu DI Lematang di Sumsel, DI Selinga di Jawa Tengah, DI Bali Ase, DI Gilireng di Sulsel, DI Bintang Bano ini yang bendungan-bendungannya yang baru yaitu di Gilirang, Baliase, Bintang Bano, kemudian Iwangga di Papua dan rehabilitasi dan peningkatan irigasi seluas 98,700 Hektar, DI Ikoming di Sumsel, DI Rentang, Cileweng, DI Lapek Selatan Jabar, DI Cihaur, DI Logung di Jateng dan DI Mrican Jatim dan DI Sadang di Sulsel.

Pembangunan pengendali banjir sepanjang 62,75 Km antara lain di pengendalian banjir kali Bekasi, Sungai Barabai, Sungai Lambidaro, Sungai Lojibangor. Pengendali banjir kawasan Tambaklorok di Semarang, pengendali banjir DAS Sangrai 1A 1B di IKN dan Sungai Sepaku, Sungai Pamaluan, Sungai Seluang, dan Pengit.

Pembangunan pengendalian sedimen air gunung berapi sebanyak 4 unit, *ground sill* Cipamingkis 3 unit, pengendali sedimen Sungai Rada.

Dan, pembangunan pengamanan Pantai sepanjang 25 km di KEK Tanjunglesung, Pantai Kalianda, Pantai Tulah di Provinsi Kepulauan Riau, Eretan, Pantai Cilacap, Pantai Kabupaten Sambas tahap 2, dan Pantai Raja Ampat.

Dan pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 2,6 m<sup>3</sup>/detik, air baku Bendungan Gongseng, Tukul, Bendo, Widekso, Pasaloreng. Ini semua bendungan-bendungan yang baru, jadi kita memanfaatkan bendungan yang ada untuk air baku. Air Baku di Raja Ampat, Air Baku di KEK Sorong, dan Air Baku Sepaku dan Embung KIPP di IKN.

Untuk Dirjen Bina Marga sebesar 49,31 Triliun dengan kegiatan prioritas antara lain: Pembangunan jalan sepanjang 489 km, antara lain di Kempang Pameo Aceh, Lahewa Afulu batas Nias-Sumut. Teluk Tapang Bunga Tanjung Sumbar, Toapejat Rokot Sioban Sumbar, Teluk Buton Klari Kepri, Lingkar Tuban, dan Lingkar Utara Lamongan Jawa Timur, Rasaojaya Batas Negara Kalbar, Siding Seluas Sekayan Entikong Kalbar, *Bypass* Maminasata Sulsel, Towe Hitam Oxibil Papua, Kwatisore Kampung Muri Papua, Kemiri Depapre Papua, PLTN Yategun ini penyelesaian, Lingkar Sorong Papua Barat.

Pembangunan duplikasi jembatan sepanjang 10 km yaitu Krueng Tamiang, Krueng Pedada, akses pelabuhan Sumut, Cilangka dan Kampung Muri dan Kwatisore. Peningkatan kualitas, ini termasuk juga nanti adalah pasti ditanya oleh Pak Bakri itu Jembatan Kali Rambut.

Kemudian peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 49 km yaitu di Serang-Panimbang dan Semarang-Demak.

Peningkatan aksesibilitas *flyover*, *underpass*, terowongan sepanjang 2,2 km yaitu *flyover scape* ujung Sumsel, Gelumbang Sumsel dan Aloha Jatim.

Dan, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 3.340 km serta preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 30,4 km.

Preservasi rutin jalan sepanjang 47.763 km Jembatan Nasional sepanjang 510 km dan revitalisasi drainase dan Jembatan Gantung serta padat karya.

Dan, seingat saya di 2023 kami juga mempunyai program KPBU penggantian 37 Jembatan Kalender Hamilton. Jadi, yang semuanya dikerjakan oleh KPBU dengan swasta, sudah mulai Tahun 2022 tapi baru perencanaan nanti 2023 pelaksanaan fisiknya.

Kemudian Dirjen Cipta Karya sebesar 25,03 Triliun dengan prioritas antara lain: Pembangunan dan peningkatan SPAM dengan kapasitas 2.206

liter/detik. Pembangunan SPAM mebidangro Provinsi Sumut, ini bukan baru tapi ini menyelesaikan. Jadi, untuk mebidangro sebesar 1.100 liter/detik.

SPAM Regional Watusokas di Jawa Tengah Wonogiri, SPAM Mamminasata di Makassar, di Sulsel, SPAM kawasan industri terpadu Batang, HIPA dan Jaringan Katulampa Kota Bogor mendukung Istana Bogor. SPAM Bendung Bintang Bano, ini yang menyelesaikan untuk pemanfaatan bendungan Bintang Bano. Serta jaringan perpetaan SPAM Sepaku mendukung IKN.

Kemudian, optimalisasi SPAM sebanyak 680 sambungan rumah yaitu: Optimalisasi SPAM Durolis di ini KPBU di Provinsi Riau. SPAM Kaimana Kabupaten Kaimana, SPAM Airbangis dan SPAM berbasis masyarakat PAMSIMAS sebanyak 276.000 sambungan rumah tangga di 1.725 Desa, berupa kegiatan PAMSIMAS.

Yang kedua, sistem pengelolaan air limbah domestik dengan layanan 16.600 KK antara lain, *Jakarta Sewarage System*, *Pekanbaru Waste Water Treatment Plan*, perpetaan air limbah di Kota Jambi area barat, zona utara Kota Pekanbaru, Kota Palembang, dan Kota Makassar.

Pembangunan IPAL KIT Batang, serta pembangunan IPAL mendukung IKN.

Sistem pengelolaan persampahan dengan layanan 26.500 KK dan sanitasi berbasis masyarakat atau SANIMAS dengan layanan 93.720 KK berupa pembangunan SANIMAS Part E di 156 lokasi. SANIMAS Part S di 1.000 lokasi, TPS3R di 106 lokasi dan sanitasi di 1.381 Lembaga Pendidikan Keagamaan.

Kemudian, penataan permukiman kumuh perkotaan yang ditangani secara terpadu seluas 306 Hektar antara lain peremajaan kawasan Kedaung Kota Tangerang, Kabupaten Muna, penataan kawasan strategis pariwisata dan kegiatan strategis lainnya seluas 1.430 hektar, antara lain *waterfront city* Pasuruan dan Tele KSPN Danau Toba, KSPN Wakatobi, KSPN Dieng, Kawasan Kaimana, dan pembangunan infrastruktur pemukiman berbasis masyarakat melalui program PISEW di 450 Kecamatan dan penanganan kemiskinan ekstrim di 70 lokasi.

### **Ibu-Bapak sekalian yang kami hormati,**

Khusus untuk KOTAKU, ini sekarang juga tidak hanya untuk peremajaan atau peniadaan kawasan kumuh, tapi juga diintegrasikan dengan program-program perumahan, program-program air bersih, program-program SANIMAS, PAMSIMAS dalam rangka penanganan penurunan kemiskinan ekstrim yang di bawah koordinasi Menko PMK dan BKKBN.

Selanjutnya, Penyelenggaraan Bangunan Gedung seluas 10.750 m<sup>2</sup> antara lain: Pembangunan TSTH 2 di Polung, Poltek Pekerjaan Umum, Papua *Youth Creative Hub* serta SPK Natuna dan penataan bangunan dan lingkungan

di 20 kawasan pembangunan PLBN Longnawang, Jagoebabang, Longmidang, dan Longlabang. Kemudian Benteng Pendem di Ngawi untuk penyelesaiannya, Rumah Betang Nusa Hilir di Sintang kalau nggak keliru, waktu kami kunjungan ke sana dengan Bapak Ketua Komisi V. Taman Balaikambang di Jawa Tengah, termasuk untuk dukungan IKN. Kawasan dan bangunan Istana Presiden, Istana Wapres, Kantor Kemenko, Kemensetneg, Kementerian Lembaga lainnya, Masjid Negara, dan Beranda Nusantara.

Yang selanjutnya ada rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana Sekolah Madrasah yang tersebar di seluruh Indonesia. Serta pembangunan dan rehabilitasi PTN PTKIN antara lain: gelanggang inovasi dan kreativitas UGM, Universitas Negeri Padang, Universitas Indonesia, Universitas Negeri Andalas, Institut Teknologi Kalimantan, IAIN Metro, Universitas Malikusaleh, Gedung Laboratorium Keagamaan UIN Antasari, Banjarmasin.

Selanjutnya, adalah rehabilitasi dan renovasi pasar, selain Pasar Gede Klaten, tahap dua. Pasar Mardika, Pasar Thumburini di Fakfak, Pasar Induk Kota Batu, Pasar Tempe Sengkang Labuan Bajo dan Pasar Tanjung Pinang. Serta pembangunan prasarana olahraga untuk *Indoor Multifunction Stadium* dalam rangka Kejuaraan Dunia Bola Basket Tahun 2023 dan Venue Panjat Tebing, di Jakarta.

Dirjen Perumahan sebesar 6,98 Triliun dengan kegiatan prioritas antara lain: pembangunan rusun sebanyak 4.575 unit, antara lain untuk ASN, TNI/Polri, MBR, Pekerja, Mahasiswa Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan, (suara kurang jelas) termasuk kegiatan MWC 2022-2023 yang harus kita selesaikan. Dan, program OPOR-nya sebanyak 99 *tower* dan hunian pekerja konstruksi di IKN yang akan menampung 15.600 orang pekerja konstruksi.

Dan, pembangunan Rusus sebanyak 26.260 unit untuk masyarakat terdampak bencana alam dan konflik sosial, Program Pemerintah, Masyarakat dan Petugas, di daerah 3T, kawasan perbatasan, termasuk pelaksanaan kegiatan OPOR untuk sebanyak 360 unit dan pembangunan rumah dinas di IKN sepanjang 2022-2024. Kemudian, pembangunan PSU sebanyak 27.825 unit dan perumahan bagi MBR yang tersebar di 34 provinsi dan lima lokasi jalan akses perumahan. Ini adalah sarana umum, bantuan sarana umum untuk kawasan-kawasan perumahan yang dibangun oleh pengembang. Jadi, bisa berupa jalan, air bersih maupun MCK-nya atau air sanitasinya. Kemudian bantuan rumah swadaya sebanyak 103.000 melalui skema BPS.

Yang kelima adalah dukungan Manajemen Dirjen Bina Konstruksi, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, Perumahan, BPSDM, BPIW, Sekjen, Irjen sebesar 1,95 Triliun.

**Ibu-Bapak Anggota Komisi V dan Pimpinan yang terhormat dan kami hormati,**

Selain melaksanakan APBN, Kementerian PUPR juga melaksanakan Program Pembiayaan Perumahan dengan total anggaran 34.17 Triliun, ini yang

ada di BUN, melalui fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan FLPP anggarannya adalah 25,18 Triliun sebanyak 220.000 Unit. Kemudian, subsidi bantuan uang muka dengan anggaran 890 Miliar untuk sebanyak 220.000 Unit. Subsidi selisih bunga dengan anggaran 3,4 Triliun sebanyak 754.000 Unit dan TAPERA dengan anggaran 4,64 Triliun dan sebagai dana masyarakat sebanyak 54.924 Unit.

Untuk Program Padat Karya Tahun 2023 sebesar 14,34 Triliun, ini kami perbesar, dibesarkan dari hasil raker sebelumnya. Jadi, kami ulangi untuk padat karya, sesuai dengan aspirasi Bapak-Bapak, saya tingkatkan menjadi 434 Triliun, ditargetkan akan menyerap 712.000 tenaga kerja dengan rincian:

- Bidang Sumber Daya Air sebesar 5 Triliun,
- Bidang Jalan dan Jembatan: 4,78 Triliun,
- Bidang Permukiman sebesar 2,11 Triliun, dan
- Bidang Perumahan senilai 2,45 Triliun.

**Pimpinan Komisi V,  
Wakil Ketua DPR yang terhormat dan kami hormati,  
Serta Ibu-Bapak Anggota Komisi V DPR RI,**

Yang selanjutnya adalah laporan tentang usulan program-program yang akan didanai oleh DAK.

**Ibu-Bapak sekalian yang kami hormati,**

Beberapa produk hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan DAK fisik, dapat dijelaskan sebagai berikut. Yaitu tentang Undang-Undang tentang APBN dan Perpres tentang rincian APBN yang mengatur besaran alokasi dana per bidang tematik, yang didukung masing-masing bidang dan ketentuan umum pengalokasian serta alokasi Pemerintah Daerah.

Kemudian, Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 dan Perpres Tentang Rencana Kerja Pemerintah yang memuat kerangka terkait Pembangunan Jangka Menengah Nasional meliputi prioritas nasional, program prioritas, manajer *project*, dan kerangka pendanaan termasuk yang dilaksanakan melalui DAK dan penjabaran setiap tahunnya.

Produk hukum yang ketiga adalah Perpres tentang Petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik yang mengatur bidang tematik yang didukung DAK serta tahapan umum pengelolaan DAK oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah ditetapkan setiap tahun.

Kemudian yang keempat, Permen, Peraturan Menteri PPN Bappenas Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perencanaan Dana Transfer Khusus yang mengatur tata cara perencanaan yang meliputi penyusunan arah kebijakan, pengusulan kegiatan, penilaian dan penetapan rencana kegiatan, pelaporan dan pemantauan kegiatan DAK.

Kemudian, Permen Keuangan Nomor 198 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik yang mengatur mekanisme penganggaran, pengalokasian, penyaluran, dan pemanfaatan sisa DAK fisik.

Yang terakhir yang kelima adalah Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional, pengelolaan dana alokasi khusus fisik infrastruktur PUPR yang mengatur mekanisme, persiapan teknis, penilaian teknis, pelaksanaan pemantauan evaluasi, dan NSPK sebagai pedoman bagi Pemda dalam pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Permen PPN Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rancangan RKP, maka DAK diarahkan untuk:

1. Mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.
2. Mendukung ketahanan pangan.
3. Mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan
4. Mendukung konektivitas daerah.

Dari 548 Pemda, Kementerian PPN Bappenas menetapkan 494 lokasi prioritas di 33 Provinsi, 394 Kabupaten, dan 67 Kota untuk DAK infrastruktur PUPR. Yaitu Bidang Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi, Perumahan, dan Permukiman. Masing-masing Pemda yang telah ditetapkan sebagai lokasi prioritas dapat mengusulkan kegiatan sesuai dengan bidangnya.

Berdasarkan, Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S35/PK/2022 tanggal 29 Juli 2022, Pagu Indikatif untuk kelima bidang DAK fisik infrastruktur PUPR adalah sebesar 16,05 Triliun dengan rincian:

- Bidang Jalan 10,50 Triliun.
- Bidang Irigasi 1,6 Triliun.
- Bidang Air Minum 1,95 Triliun.
- Bidang Sanitasi 1,57 Triliun.
- Bidang Perumahan dan Permukiman 430 Miliar.

Kelima, proses perencanaan dan penganggaran DAK dimulai dari penentuan arah kebijakan oleh Kementerian PPN Bappenas. Kemudian, sosialisasi kepada Pemda mengenai kebijakan DAK dan mekanisme pengusulannya serta tahap pengusulan Pemda dan usulan aspirasi DPR RI. Penataan dan pendetailan usulan, penilaian, dan sinkronisasi, harmonisasi usulan dan penghitungan alokasi oleh Kementerian Keuangan sampai dengan pembahasan dan persetujuan RK atau rencana kegiatan.

Yang keenam, Pemerintah Daerah melakukan *input* usulan kegiatan melalui aplikasi KRISNA DAK, sedangkan Kementerian Keuangan melakukan input usulan aspirasi DPR RI yang diterima dari Banggar DPR RI.

Selanjutnya Kementerian PPN Bappenas melakukan pemetaan dan seleksi eligibilitas kegiatan berdasarkan kesesuaian lokasi prioritas. Sedangkan Kementerian PUPR melakukan verifikasi berdasarkan kriteria



teknis. Yaitu kondisi dan layanan infrastruktur yang ada, luas dan panjang kewenangan dan sebagainya.

Dan pemenuhan *readyness criteria*, jadi Kementerian PUPR melakukan verifikasi berdasarkan kriteria teknis kemudian *readyness* kriteria, BID, lahan dan sebagainya. Hasil pemetaan dan verifikasi tadi menjadi masukkan bagi Kementerian Keuangan untuk melakukan perhitungan alokasi DAK per Pemda yang kemudian dibahas dengan Banggar DPR RI untuk ditetapkan.

**Ibu-Bapak sekalian yang kami hormati,**

Saya kira itu yang bisa kami laporkan dari keempat topik sesuai dengan undangan. Yaitu laporan tentang audit BPK untuk Kementerian PUPR Tahun 2021, realisasi 2022 sampai dengan Agustus 2022. Kemudian RKA K/L 2023 dan usulan program-program yang akan didanai oleh DAK.

Demikian kami sampaikan Bapak, mohon arahan dan masukkan sebelum nanti terutama untuk Tahun 2023. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Menteri atas penjelesannya.

Sebelum ke Anggota saya ada satu hal yang perlu saya luruskan dulu, ini sebetulnya kesalahan terjadi mulai kemarin ini. Saya mau tanya dulu ke teman Banggar ini, kebetulan ada Pak Hamka di sini. Ini, mana perhubungan tuh di sini? di perhubungan itu kan Pak Hamka ya? Bukan ini Bu, kesimpulan rapat yang satunya tadi kan tadi ada dua kesimpulan rapatnya, yang lama sama yang baru.

Di Perhubungan ini Pak, kesimpulan rapat kita raker tanggal 7 Juni Pak Hamka ya? itu jumlah Pagu Perhubungan itu kan 73 eh *sorry* 33021. Ini kok sama ini tetap ini Bu, ya kenapa beda-beda kasih saya.

Di Pagu Indikatif 2023 pada rapat 7 Juni Pak Hamka 2022 Rp33.021.955.285.000. Kemudian kemarin ada tambahan sebesar 419 rupanya, ya saya sendiri kemarin tidak tahu ini ada tambahan Rp419.234.559.000. Sehingga kemarin kita tetapkan berubah Pak, dari tanggal 7 ke tanggal 24 Agustus. 7 Juni 2022 ke 24 Agustus 2022 karena ada tambahan sejumlah 419 Miliar 234 juta sekian menjadi Rp33.441.189.844.000.

Setahu saya Pak mekanisme jika ada perubahan, itu kan ada perubahan dari Badan Anggaran dulu ya baru masuk di kita. Sementara kemarin saya *ndak* terima Pak surat dari Badan Anggaran ada perubahan. Hal yang sama juga terjadi dengan PU hari ini, ya Pak ya. Ini supaya kita jangan sampai nanti *miss* di internal kita, rupanya yang berubah bukan cuma itu saja di mitra kita Pak. Di PDT juga ada berubah, kemudian BMKG juga ada perubahan.

*Nah*, perubahan ini nggak ada pemberitahuan dari Banggar kesini Pak, mohon penjelasan dulu nih Pak ini kebetulan beliau ada di sini dan aktif di Banggar. Ada informasi nggak soal ini? Silakan Pak.

**F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):**

Makasih Pimpinan.

Banggar juga belum membahas Pak Ketua, itu langsung dari Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Kementerian Keuangan. Belum membahas juga secara khusus mengenai penambahan itu. Itu saja penjelasannya Pak Ketua, belum ada pembahasan mengenai itu. Makasih.

**KETUA RAPAT:**

Coba Pak Tamliha, abis itu Pak ini, Pak Roberth, silakan.

**F – PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

**Terima kasih Ketua dan Para Anggota yang terhormat,  
Pak Menteri,**

Biasanya itu di Badan Anggaran, saya kan 12 tahun di sana. Itu semestinya Bapak dikasih tahu oleh Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan, masing-masing komisi diberi tahu oleh badan anggaran. Yang jadi *problem* kok tahun ini tidak ada pemberitahuan dari badan anggaran kepada Komisi V, ada penambahan ini. Sehingga kita tidak *pingin* nanti ini barang yang dari mana? Siapa punya?

Kalau ini kan sudah final sebenarnya, begitu kita sampaikan ke sini Pak Ketua jumlahnya sekian, (suara kurang jelas) sekian, kitalah yang membahasnya tambahan itu, itu semestinya. Saya kira Pak Ketua juga beberapa tahun sebelumnya pasti menerima surat dari Pimpinan Banggar. Kalau internal pemerintah kan Menteri Bappenas sama Menteri Keuangan. Makasih Pimpinan.

**ANGGOTA KOMISI V DPR RI:**

Pimpinan.

**F – P. NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):**

Interupsi.

**F – P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Iya.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar, sebentar, Pak Roberth dulu biar satu-satu bicara.

**F – P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Iya justru itu, saya kira Ketua tanya Pak Hamka itu, kurang pas gitu. Tanya Pak Syarif, Pak Syarif itu Wakil Ketua Banggar Pak, itu yang pas gitu. Jangan tanya Pak Hamka, tanyalah Pak Syarif sebagai unsur Pimpinan, gitu.

**KETUA RAPAT:**

Tadi kelindung Pak Syarif jadi nggak kelihatan.

**F – P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Jadi itu yang harus kita lakukan di sini, kita di sini lengkap gitu ada Anggota Banggar ada salah satu Wakil Ketua Banggar. Maka ini yang perlu kita minta supaya melalui Pak Syarif, Pimpinan Komisi V harus bisa bertemu dengan Pimpinan Banggar untuk hal-hal seperti ini.

Dan, saya lihat tadi juga ada anggaran tentang 2022 untuk IKN, menurut saya kemarin kita bahas 2022 nggak ada tuh spesifik IKN berapa yang kita ketok di sini, tiba-tiba kok ada tadi Pak Menteri sampaikan, gitu, ada lelang ini ada lelang ini di dalam pembahasan tadi. Ini juga menjadi pertanyaan kami, darimana ini masuk seperti itu. Kami sebagai Pimpinan, salah satu Pimpinan di Komisi V tidak pernah melihat itu di dalam pembahasan kita. Itu Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, mungkin Pak Syarif silakan.

**F – P. NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):**

Sebenarnya tadi saya sudah interupsi untuk menjelaskan ini, begitu ya, kaitan dengan ini. Karena begini Pak Ketua, jadi kalau ditanya ini merupakan keputusan Banggar saya kira bukan, karena ini memang kita belum membahas, kemarin kita baru rapat bersama Menteri berkaitan dengan pengantar nota keuangan dan pertanggungjawaban keuangan.

Sehingga, dengan demikian ini baru kita menyusun jadwal untuk pembentukan Panja. Jadi, saya kira ini merupakan juga yang masukkan kepada kami pada hari ini tentu menjadi bahan kami berkaitan dengan itu, karena kita belum rapat untuk berkaitan dengan anggaran di 2023.

Dan, ini kan selalu kita kan belum mengundang juga Pak Sekjen nih, yang selalu hadir di kita itu kan wakil dari PUPR, Sekjen PUPR. Kemarin ya saya, jadi syukur juga ini artinya merupakan hal ini karena kami pun Pimpinan kita baru membahasnya dual ini rapat Pimpinan. Saya kira itu penjelasan bagi kami, tentu ini merupakan menjadi perhatian bagi kita untuk kita luruskan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, jadi gini Pak, Pak, teman-teman sekalian, terima kasih Pak Syarif. Kan di DPR ini kan ada siklus, kan gitu Pak Jhonni ya, selalu diberi tahu ke Komisi siklusnya seperti ini, jadwalnya dari tanggal ini ke tanggal ini, siklusnya begini, nanti Pagu Indikatif berada di sini. Kalau ada perubahan nanti ada pembahasan di sini pemberitahuannya pada tanggal sekian dan seterusnya.

Kita sudah menetapkan Pagu Indikatif pada tanggal, khusus saya, saya bicara perhubungan dulu Pak ya, karena ini yang sudah ini. Perhubungan kita pernah menetapkan pada tanggal 7 Juni yang lalu, kemudian kemarin tanggal 24, kita menetapkan lagi rupanya angkanya beda. Saya baru *ngeh* sekarang, Pak Ketua.

Nah, sekarang dari sisi mekanisme ini Pak Syarif ya, saya mohon tanya juga ini kalau memang perlu ada perubahan kembali kita terpaksa mau undang raker lagi Pak Menteri Perhubungan, satu dua hari ini untuk memperbaiki yang sudah kita tetapkan kemarin. Karena belum melalui mekanisme di Badan Anggaran, ini saya perlu pendapat ini. Pak Jhonni silakan.

**F – P. DEMOKRAT (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.):**

Jadi begini, pertama kita harus apa, dalam hal ini kan positif. Tapi positif ini pun juga harus melalui mekanisme supaya nggak salah. Nah, karena temuan ini ada di Komisi, ya toh. Pimpinan Komisi memberikan surat kepada Pimpinan Anggaran dengan angka-angka tadi. Di mana mekanismenya sebagaimana mestinya harus dirapatkan dulu, diputuskan dulu di Badan Anggaran. Namun demikian secara katakanlah berjalan ini boleh kita bahas, tetapi dengan begitu nanti surat dari katakanlah panitia anggaran, ya toh, datang itu kita anggap sah. Saya kira gitu saja supaya tidak *mubazir* waktu kita yang sudah rapat.

Saya kira gitu jadi lebih kepada persoalan mekanisme administratif, kan ini kan nilainya positif. Jadi, Pimpinan Komisi memberikan surat untuk mengatakan loh kok begini, nah itu saja saya kira poinnya walaupun ini tetap bisa tetap kita lanjutkan sehingga begitu nanti surat itu sudah *clear* kita anggap apa yang kita sudah ketok ini, apa, kalau perlu diundang lagi untuk mengesahkan. Saya kira gitu saja Pimpinan supaya tidak *losing* kita waktu yang sudah berjalan beberapa hari. Makasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik saya setuju dengan usul Pak Jhonni, tapi saya perlu pendapat dari forum semua supaya nanti di rapat berikutnya jangan ada yang

mempermasalahkan. Karena ini tidak lazim di mekanisme kita, ya kan sesuatu yang tidak lazim kan perlu kesepakatan. Kesimpulan tertinggi adalah kesepakatan kita di *floor* ini. Saya tanya kalau kita setuju dengan apa yang disampaikan Pak Jhonni saya ketok. Tapi, saya mulai dari Pak Syarif dulu, mohon izin.

Pak Syarif ada usul dari Pak Jhonni. Ini kan contoh perhubungan kita sudah tetapkan, nanti Pimpinan bikin surat ke Badan Anggaran bahwa kita sudah menetapkan, ada tambahan kepada Kementerian Perhubungan yang disampaikan pada rapat tanggal sekian. Nanti kan ada balasan surat dari Badan Anggaran, ya ini kan sifatnya administratif ini, berupa, balasan surat itu men-*declare* kesimpulan rapat kita kemarin. Kalau bisa seperti itu ya kita lanjutkan, kan begitu, kalau tidak bisa ya nanti yang tambahan kita bawa ke Banggar dulu. Nanti setelah ada pemberitahuan dari Banggar baru kita tetapkan di sini, kan itu-itu saja sebetulnya. Mohon izin, Pak Syarif.

**F – P. NASDEM (H. SYARIEF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):**

Iya terima kasih, Pak Ketua.

Tadi juga saya koordinasi juga dengan Pimpinan Banggar yang lain, ternyata memang kita belum membahas 2023 itu. Jadi, sebaiknya saya kira kalau memang hal seperti itu, mungkin bisa surat dari Komisi V ke Pimpinan Banggar berkaitan dengan itu. Sehingga, dengan demikian tentu merupakan menjadi apa menjadi domain di Komisi V.

Saya kira bagi kami silakan saja, apakah mekanismenya kita yang pertama atau yang kedua bagi kami nggak ada masalah. Tapi, saya sebagai Pimpinan kebetulan di Pimpinan Banggar menjelaskan hal itu kita belum membahas hal itu. Sehingga terserah dari Komisi V maunya seperti apa Pak.

**F – P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN S.IP., M.P.):**

Pimpinan interupsi, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ya silakan, Pak Irwan.

**F – P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN S.IP., M.P.):**

Menurut saya tidak perlu diteruskan dan tidak bisa diteruskan. Karena saya juga di Banggar gitu, saya juga pasti masuk dalam Panja pembahasan ini. Tapi dasarnya apa? Justru menurut saya yang Perhubungan kemarin, harus kemudian kita rapatkan kembali, karena itu bisa saja berubah, karena putusan semua anggaran kan harus melalui Badan Anggaran.

Sehingga, menurut saya ini nggak usah diteruskan, walaupun kita meneruskan ini ya kita bahas memang terkait evaluasi-evaluasi yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Karena saya termasuk juga 2022, karena saya melihat juga ada beberapa program juga apa namanya, program terutama masing-masing di daerah pemilihan belum fokus, begitu. Tapi terkait anggaran ini nggak bisa kita jadikan acuan Ketua, itu, jadi nggak bisa cukup dengan surat ke Banggar.

**KETUA RAPAT:**

Ya Pak Ridwan, silakan.

**F – P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Makasih Pak Ketua.

**Yang saya hormati Pak Ketua,  
Yang saya hormati Pak Rahmat Gobel, Bapak Wakil Ketua DPR RI,  
Yang saya hormati Bapak-Ibu Anggota Komisi V,  
Yang saya hormati Pak Menteri PUPR dengan seluruh jajarannya,**

Saya memang juga kaget setelah baca ini, dari kemarin saya baca saya tidak perhatikan baik-baik. Saya pikir tatanan dan mekanisme DPR RI ini sudah berjalan seperti apa adanya. Tapi, saran Pak Jhonni Allen tadi harusnya menjadi pikiran kita agar tidak terlalu mubazir kita punya rapat-rapat seperti ini. *Toh*, kita tidak ada penjaranya kalau kita teruskan ini hanya di mekanisme saja. Nah, kalau kita mekanismekan misalnya adalah kita rapat kita teruskan hari ini. Kita simpulkan seperti perhubungan kemarin, lalu kita surati Banggar sebagaimana apa yang kita dapatkan hari ini, kita surati.

Jadi, saya memberi dukungan apa mendapat, pendapat dari Pak Jhonni Allen tadi. Bahwa kita teruskan rapat ini kemudian kita simpulkan, lalu dari kesimpulan itu kita proses kepada Banggar bahwa ada kondisi seperti ini. Gitu barangkali Pak Ketua, terima kasih Pak Ketua.

**F – P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):**

Izin, Pimpinan.

**ANGGOTA KOMISI V DPR RI:**

Izin.

**ANGGOTA KOMISI V DPR RI:**

Izin.

**F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Pimpinan.

**F – P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Pak ini dulu, Pak Eddy Santana habis itu Mas Dewo.

**F – P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):**

Makasih Pimpinan.

Jadi menurut saya, saya mendukung begini. Kita ini berproses Pak, ini kan RAPBN ya kan. Berproses itu tentu Pemerintah melihat juga pendapatan begitu, ya kan untuk dibelanjakan ada pendapatan ada belanja. Nah, kalau dari Menteri Keuangan misalnya memberikan gitu kan tambahan dari Bappenas, Menteri Keuangan, itu ya kita lanjutkan saja, gitu, apa yang harusnya sudah ada komunikasi pasti dari Kementerian Lembaga ini.

Tinggal mekanisme ini, kan kita nggak salah juga belum selesai kita masih berproses, baru dibicarakan dengan Banggar terpimpin *nah*, ini kok dulu biasanya begini, kita tetapkan, apakah sudah ditetapkan nggak boleh berubah? Kalau ada duitnya Pak, bisa berubah. Mungkin begitu saya kira ada tambahan-tambahan, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Oke setuju dengan pendapat Pak Jhonni ya?

**F – P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):**

Iya.

**F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):**

Izin Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik. Pak Dewo, Pak Hamka di sebelahnya, Pak Dewo duluan karena Pak Dewo tadi yang, silakan Pak Dewo dulu, silakan.

**F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Terima kasih Pimpinan.

Kalau kita berpegang pada aturan main, pasti kita tidak akan bisa setuju dengan anggaran ini. Kalau dari pihak Pemerintah tidak ada masalah, karena Pemerintah sudah berpedoman dari Menteri Keuangan dan Bappenas. Tapi

dari kita ini tidak lazim kalau mekanisme ini kita langgar, kalau kita mengesahkan tentu kita dalam kategori menyimpang terhadap aturan main. Tetapi saya juga sepakat kalau andaikata dalam forum ini kita bahas untuk mengenai hal-hal yang prinsip, tetapi dalam kesimpulan nanti kita juga tidak bisa mengesahkan Pagu Indikatif yang diajukan oleh Kementerian PU.

Akan tetapi andaikata kita bisa duduk bersama berbicara secara intensif, diskusi dengan matang dengan Menteri PUPR, Pak Ketua, untuk kita *break* sementara waktu barangkali 15 menit atau 20 menit untuk menyamakan persepsi ya, terhadap hal ini. Saya kira saya usul di-*break* sementara waktu Pimpinan, terima kasih.

**F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):**

Izin, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, sebentar Pak Menteri, silakan Pak Hamka.

**F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):**

Makasih Pimpinan.

Pemahaman saya dan pengalaman saya bahwa pada saat pembahasan Pagu Indikatif Pendahuluan kemarin. Itu adalah usulan Pemerintah pertama, yang kita bahas itu namanya APBN Pendahuluan. Setelah pengantar nota keuangan dibacakan tanggal 16 Agustus dalam Pidato Kenegaraan Presiden, setelah itu terjadi perubahan, itu masih area pemerintah. Setelah itu baru masuk ke Badan Anggaran untuk disinkronisasikan.

Oleh karena itu, saya sependapat dengan Pak Jhonni dan memang seperti itu kira-kira Pak Ketua, ya. Tidak ada hal yang perlu kita persoalkan, kita duduk dulu *skorsing* untuk menjernihkan ini. Sebenarnya Pagu Indikatif pertama dan kedua itu baru seluruhnya dari Pemerintah, belum ada campur tangan DPR dan Badan Anggaran, belum ada. Persoalan lainnya itu tergantung setelah Presiden mengumumkan pidato kenegaraan, ada tambahan pendapatan mereka, baru diusulkan saat sekarang ini. Itu pemahaman saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik.

**F – PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ., M.M.):**

Izin Pimpinan.



**F – PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):**

Izin Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar, sebentar Pak Hamka berarti usul Pak Jhonni ya?

**F – PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Setuju ya baik.

**F – PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):**

Suryadi Pak.

**ANGGOTA KOMISI V DPR RI:**

Diskor Pak.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar sebentar sebentar. Bu Neng silakan.

**F – PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ., M.M.):**

Oke terima kasih Pimpinan.

Saya kira mendengar penjelasan beberapa teman-teman tadi, alangkah baiknya kalau kemudian dari pihak Kementerian mungkin untuk memberikan informasi atau keterangan terkait ini, barangkali ada informasi yang bisa berguna untuk kita, sebelum kemudian kita memutuskan apakah ini di-*break* atau dilanjut atau seperti apa. Mungkin itu saja, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Oh pasti-pasti nanti kita kasih kesempatan Pemerintah.

**F – PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):**

Izin Ketua, Suryadi

**KETUA RAPAT:**

Kita sepakati dulu forum kita,

**F – PKB (H. SYAFIUDDIN, S.Sos.):**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baru nanti kita kasih kesempatan.

**F – PKB (H. SYAFIUDDIN, S.Sos.):**

Pimpinan.

**F – PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):**

Pak Suryadi Pak Ketua.

**F – PKB (H. SYAFIUDDIN, S.Sos.):**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Pak Suryadi silakan.

**F – PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):**

Baik.

**KETUA RAPAT:**

Abis itu Pak ustadz di belakang.

**F – PKB (H. SYAFIUDDIN, S.Sos.):**

Saya juga Pak Pimpinan.

**F – PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):**

Ya terima kasih Pak Ketua.

Agenda kita hari ini sesuai dengan undangan itu kan ada empat poin Pak Ketua. Yang pertama laporan, evaluasi laporan keuangan, kemudian realisasi APBN 2022, tiga dan empat nya menyangkut 2023. *Nah*, oleh karena itu saya setuju kita skor, walaupun lanjut itu hanya satu sampai dua, karena kita tidak ingin membahas dua kali. Mekanismenya kan jangan sampai apa yang sudah kita bahas ternyata mentah lagi begitu, lebih baik saya setuju kita skor atau walaupun lanjut kita hanya satu dan dua baru tiga dan empat nya ini nanti kita *pending*. Jadi, kesimpulannya kita skor dulu Pak Ketua untuk bahas, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Pak Syafiuddin silakan.

**F – PKB (H. SYAFIUDDIN, S.Sos.):**

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Habis ini Pak Menteri, silakan.

**F – PKB (H. SYAFIUDDIN, S.Sos.):**

Kita bahwa politik anggaran itu kan ada di Banggar, jadi mekanisme itu mari kita bersama-sama biar terang benderang, kita juga menghormati bahwa Banggar ini ibarat orang tua kita. Artinya kalau kita dikasih anggaran, kalau kita dikasih sugu itu kan dari mana sumbernya? Halal apa haram? Kan gitu. Jadi menurut saya ini kita sepakat untuk tidak dilanjutkan Pak Ketua.

Minimal kalau di-*pending* dulu kita *skorsing* dulu, kita apa namanya persepsi ini disatukan antara Pemerintah dengan Komisi V. Jadi, menurut saya ini jangan apa namanya jangan tergesa-gesalah, karena ini uang rakyat. Jadi halal haramnya biar jelas nanti Pak Ketua, terima kasih.

**ANGGOTA KOMISI V DPR RI:**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik kita dengarkan dari Pak Menteri dulu coba supaya kita ada gambaran, silakan Pak Menteri.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc.):**

Ini urun rembug saja Bapak, karena judulnya adalah RKA K/L Tahun 2023 dalam Nota Keuangan dan RAPBN. Nota Keuangan dan RAPBN ini sudah disampaikan kepada DPR. Yang ini usulan Pagu-Pagu Kementerian sudah ada di situ, jadi ini usulan baru ini bukan liar, bukan di luar sistem, tapi sudah di sistem nota keuangan dan RAPBN yang sudah disampaikan kepada DPR.

Jadi, menurut saya, saya usul, bukan apa-apa Pak. Masih bisa diteruskan dan itu tidak melanggar aturan. Jadi saya setuju dengan Pak Eddy Santana, Pak Hamka, karena ini ada di dalam nota keuangan, kan ini kan ada tulisannya RKA K/L dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2023 yang sudah disampaikan oleh Presiden kepada DPR. Jadi, anggaran itu semua sudah dalam sistem itu Bapak, menurut kami mohon maaf. Terima kasih Bapak.

**KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih.

**F – P. DEMOKRAT (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.):**

Pimpinan interupsi.

**KETUA RAPAT:**

Ini ini, sama dengan apa yang disampaikan Pak Jhonni tadi ke Pak Menteri.

**F – P. DEMOKRAT (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.):**

Ya jadi supaya sinkron Pak saya tambahkan.

**KETUA RAPAT:**

Ya habis Pak Jhonni nanti Pak Tamliha, silakan Pak Jhonni.

**F – P. DEMOKRAT (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.):**

Saya kira tidak ada, saya juga kan 10 tahun Pimpinan anggaran jadi hafal betul.

Jadi Pak Menteri, tidak ada memang yang dilanggar. Ini hanya lebih kepada internal di DPR-nya, jadi tidak ada. Ini hanya internal di DPR-nya antara mekanisme administratif dalam pembahasan antar Komisi dan Banggar, itu saja. Jadi, dalam konteks Pemerintah jelas itu Presiden segala macam, saya kira nggak di situ, hanya dalam internal Banggar dan Komisi.

Oleh karena itu, makanya saya bilang tadi usul saya itu, ya bikin saja surat, ini untung plus untung plus. *Nah*, saya ngertilah teman-teman hanya barangkali memang perlu disampaikan ke Ketua ini, plusnya ini boleh nggak ke optimalisasi lebih banyak. Kan gitu aja ini curhat-curhatnya ini kan, nggak usah kita munafik lah paling di situ aja jadi curhatnya ini apa, itu kalau perlu ngapain kita buang-buang waktu segala macam ini kita tunda segala macam.

Artinya apa? Nanti kita anggap sudah sah begitu jawaban Banggar *clear* atas suratnya Komisi, ya gitu saja. Ya paling oke sekarang misalnya, apa tambahan itu menjadi katakanlah optimalisasi untuk padat karya misalnya. Ya saya ngertilah teman-teman, nggak usah malu-malu apalagi teman saya dari Madura, sudah pasti arahnya ke sana. Jadi jangan dibilang melanggar, tinggal kompromi. Iya kan?

**F – P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN S.IP., M.P.):**

Interupsi Pimpinan.

**F – P. DEMOKRAT (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.):**

Antara yang tadi, saya kira demikian Pimpinan, terima kasih.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Bentar, Pak Tamliha dulu, silakan.

**F – PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Mungkin jalan tengahnya begini, memang Pagu Indikatif kemudian naik ketika pengantar nota keuangan, begitu kan Pak Menteri. Nah, oleh karena itu yang lebih bijak, Pak Menteri menjelaskan tambahan 27 Triliun itu untuk apa saja, sehingga kita bisa melihat penggunaannya, tidak perlu kita menunda-nunda rapat ini.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, usul Pak Menteri dan Pak Jhonni, dan sudah disetujui beberapa teman tadi kita tetap lanjut, ya. Dan ini kan sifatnya administratif saja, mekanisme di DPR sebetulnya, memang di DPR tidak lazim Pak di sini. Ya nanti kan masih ada RDP lagi, ada raker lagi terakhir nanti Pak kita, nanti kita ada raker lagi. Nanti di raker nanti terakhir pun kita tetapkan pun nggak ada masalah juga sebetulnya.

**F – PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Penjelasan aja ya.

**F – P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN S.IP., M.P.):**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Kan masih ada terakhir raker setelah Banggar nanti rapat kan kita masih raker lagi Pak, apa masih ada tambah kurang nggak dari Banggar, kan gitu Pak. *Nah*, yang tidak biasa ini Pak Menteri, ada Pagu Indikatif berubah kami tidak dikasih tau dari Banggar, biasanya munculnya dari Banggar. Ini kita ini juga memang apa namanya ya, tentu kami kan nggak bisa ini kenapa bisa berubah, tanggal sekian sekian, tanggal sekian sekian, dari Pak Menteri *clear*, tapi di sistem di DPR-nya yang tidak *clear* Pak, itulah.

Ini yang harus kita sepakati, supaya bahwa yang ada yang berbeda ini oh terjadinya seperti ini dan kita sepakati. Jangan sampai nanti Banggar tersinggung pula kenapa Komisi tetapkan ada perubahan tanpa melalui kami, Banggar, kita tanya juga di sini. Ini soal mekanisme Pak, karena kami di sini jadwal tanggal hari pun apalagi angka Pak, harus dikasih tahu oleh Banggar, nggak boleh rapat soal ini di luar jadwal yang ditentukan oleh Banggar apalagi angka Pak, ituloh, baik silakan Pak Irwan.

**F – P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN S.IP., M.P.):**

Iya sekedar mengingatkan kembali saja bahwa kita kan kemarin sudah menetapkan di sini rapat pun bersama dan program yang dibahas pun sudah ada terkait Pagu Indikatif kemarin, kemudian berubah oke disampaikan di rapat Paripurna. Tetapi harusnya yang kita bahas sebelum ada arahan dari Banggar adalah yang Pagu Indikatif itu gituloh.

Jadi maksud saya kalau masalah mau bisa, semua bisa dibahas, permasalahannya ini kan harus ada alurnya gitu. Arahan Banggar bagaimana, apakah ini kemudian plus ini bisa dipertahankan dengan kondisi negara seperti ini. Kalau menurut saya sih rapatnya nggak perlu ditunda, tetapi angka-angka tidak boleh ada untuk pembahasan terkait RKA 2023. Kalaupun mau harus tetap pada Pagu Indikatif yang sudah kita tetapkan, karena baru itu yang arahan dari banggar kemarin, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, Pak Menteri tadi sudah sampaikan kepada kita di Pemerintah ini *clear*, nota keuangan itu resmi ya kan sudah *clear* dari Pemerintah, ada perubahan angka di sana itu *clear*. Hanya memang siklus di kita DPR yang belum mengikuti apa yang di proses, proses yang terjadi di Pemerintah, gituloh. Di sini selalu ketika Pagu Indikatif kita sudah tetapkan, ada perubahan itu selalu dari Banggar, ada pemberitahuan Banggar Komisi V Kementerian A, B, C, D ada tambahan A, B, C, D. Ini ada kita dapat ini Pak, nih angka-angkanya nih, saya dapat tapi ini bukan dari Banggar, gituloh, ini dari Pemerintah pemberitahuan, dan belum dibahas di Banggar.

*Nah*, pertanyaan kita, apakah nanti di Banggar angka ini tidak berubah, kan gitu, maka Banggar, kita saya sepakati dengan cara Pak Jhonni tadi sebetulnya tidak ada yang dirugikan. Rapat kita teruskan, semua kita bahas, ini kita tetapkan, manakala nanti Banggar terjadi perubahan ya, kita sesuaikan dengan keputusan Banggar, kan ndak ada yang dilanggar juga. *Nah*, maka proses itu.

**F – PAN (H. BOYMAN HARUN, S.H.):**

Interupsi interupsi Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Sehingga kita ndak buang-buang waktu rapat hal-hal yang sama, kan tidak ada masalah. Silakan Pak Boy.

**F – PAN (H. BOYMAN HARUN, S.H.):**

Iya terima kasih Pimpinan.

Buat saya mau dilanjut atau tidak, sama saja buat saya. Tetapi di dalam dewan ini kan kita punya ketentuan atau Ketua tadi juga sudah mengatakan kelaziman. Artinya kelaziman itu tuh berlaku secara terus menerus yang biasa dilaksanakan setiap rapat-rapat kerja. Keputusan hari ini juga mengikat kepada keputusan kemarin pada saat Kementerian Perhubungan melaksanakan rapat kerja yang ditetapkan oleh Komisi V dengan anggaran yang ada penambahan, jadi kita harus belajar dari sana Ketua. Jika hari ini kita lanjut, keputusan untuk yang Kementerian Perhubungan itu harus seperti apa, maksud saya seperti itu, itu pertama.

Kedua, saya pikir sesuatu yang ditoleransi itu akan mengakibatkan hal-hal lain menurut saya akan kurang baik jika kita lakukan secara terus menerus. Karena Banggar juga punya kewenangan, Banggar juga punya kewenangan dalam rangka menetapkan bahwa anggaran ini adalah berapa dari mereka. Yang saya khawatir kita berbicara anggaran hari ini ternyata Banggar tidak nambah atau justru, Banggar justru ngurang begitu.

Jadi, kalau menurut saya mau dilanjutkan atau tidak itu saja sama, tetapi yang terpenting keputusan hari ini mengikat kepada keputusan Kementerian Perhubungan yang sudah kita lakukan kemarin, jadi harus kita samakan. Ketua, tadi sudah ngomong nanti akan mengundang lagi Kementerian Perhubungan untuk raker kembali karena kesalahan dalam penetapan anggaran. Hari ini kalau kita lakukan lagi berarti kita ngelakukan hal yang sama, kesalahan kedua. *Nah*, kecuali ada kesimpulan yang dibuat pada hari ini bahwa pelaksanaan raker pada hari ini kita lakukan dengan kesimpulan tidak menetapkan angka karena angka belum pasti yang dikeluarkan oleh Badan Anggaran, harus ada kesimpulannya, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar, sebentar.

**F – P. DEMOKRAT (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.):**

Interupsi Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar sebentar Pak Jhonni sebentar, jadi begini Pak Boy. Sebetulnya nggak ada yang salah juga sebetulnya, tapi ini kan sudah kita buka harus kita buka. Saya perlu izin *nuwun sewu* Pak Menteri, kami kan DPR kan *ndak* bisa

masuk di satuan 3 Pak. Oleh karenanya, setiap angka yang masuk ini kita harus tau sumbernya dari mana dan harus ditetapkan.

Ini mohon izin nih misalnya, ternyata dari saya ambil contoh lah ambil Basarnas misalnya. Ternyata Basarnas 135 Miliar ini suatu hari ada masalah Pak, misalnya dari sumber 135, ini kan diproses ini Bang Jhonni. Waktu diperiksa kan dikejar kita darimana asal 135. Oleh karenanya itu harus kita bahas harus kita buka gituloh. Jadi, kita mengantisipasi hal-hal yang menjaga kemungkinan di belakang hari.

*Nah*, kemudian saya menanggapi apa yang disampaikan Pak Boy sebagai Pimpinan rapat. Sebetulnya *ndak* ada yang salah juga ini kita lanjut, kalau ada perubahan *toh* nanti kita tetap ada raker dengan Pak Menteri, nanti di raker terakhir angkanya kita sesuaikan setelah nanti dari Banggar berproses. Nah, sekarang yang sudah terjadi kita surati Banggar, nggak ada yang salah juga sih sebetulnya. Saya sudah baca tatib Pak, dari tadi *tak* bongkar semua nih tatib nih *ndak* ada yang dilanggar juga sebetulnya dari tatib itu *ndak* ada juga. Alurnya darimana pemberitahuan darimana, *ndak* ada juga rupanya nggak ada. Jadi boleh aja sebetulnya Pak dari tatib membolehkan.

Tapi kelaziman ini harus juga kita tanggapi dengan proses, prosesnya apa? Kita menyurati ke Banggar seperti yang tadi Pak Jhonni sampaikan. Kalau bisa disetujui rapat tetap kita lanjut sebagaimana mestinya. Kesimpulan kita ambil seperti tadi kemarin kita menyimpulkan yang Kementerian Perhubungan. Tetapi, manakala nanti ada perubahan, di raker terakhir tentu angka menyesuaikan ketika kita raker terakhir. Kalau boleh begitu saya ketok. Ya?

**F – P. DEMOKRAT (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.):**

Pimpinan.

**F – P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Tunggu Ketua, biar tanggapan lagi.

**KETUA RAPAT:**

Ya, silakan.

**F – P. DEMOKRAT (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.):**

Ini supaya nggak salah, tadi kan kita bicarakan pembahasan. Pembahasan ini kita lanjutkan, setelah nanti jawaban daripada Banggar datang, itulah itu kita sudah anggap sah, kan gitu jadi tidak ada yang dilanggar, kan ini bicara pembahasan, kenapa? Supaya lebih efisiensi waktu. Jadi, dia nanti sahnya itu atau perlu nanti setelah mendapat surat dari Banggar atas jawaban surat dari Komisi, itu bahasanya tadi saya katakan. Jadi, apa namanya



ini, pembahasan ini ya kita lanjut supaya tidak mubazir waktunya, saya kira begitu.

**F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Pimpinan.

**ANGGOTA KOMISI V DPR RI:**

Usul Pimpinan

**F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Pimpinan Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Mas Dewo, silakan.

**F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Saya singkat saja, saya sependapat dengan Pak Jhonni Allen. Dilanjutkan saja, karena kita sudah minta fatwa dari Pimpinan Banggar, dengan Anggota Banggar, saya pun juga pernah di Anggota Banggar. Dari tatib juga sudah, tidak ada yang dilanggar hal ini. Nanti dalam kesimpulan kalau memang kita mau menyepakati angka, tambah saja catatan bahwa masih menunggu dari arahan Banggar atau apa kalimatnya persetujuan Banggar, nggak ada masalah kita tuntaskan saja rapat kali ini.

Tapi kalau memang kita mau singkat lebih efektif dalam rapat ini tidak *debatable*, tidak berkepanjangan. Kasih waktu 10 menit saja kita duduk bersama dengan Menteri 15 menit dengan Pak Menteri. Sudah selesai nanti efektif rapat kita, terima kasih.

**F – P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Iya silakan Pak Ridwan, silakan.

**F – P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Ya, sebenarnya kan sudah tersimpul ini Pak, tadi Pak Menteri telah menjelaskan itu. Dan, kalau kita lihat ruang-ruang apa namanya *clear* itu persoalan Pemerintah. Karena Pemerintah telah menyerahkan melalui Presiden, Presiden melalui Paripurna. Nah, Paripurna secara tegas telah memberikan kepada kita, oleh Banggar tidak mustahil menganggap bahwa ini

adalah sudah mekanisme juga yang ada dilakukan karena Banggar, sudah, Presiden sudah menyerahkan melalui Paripurna.

*Nah*, makanya Banggar dengan siklus yang ada diperintahkan kepada kita untuk membahas, nah yang kita bahas hari ini. Besok kita melapor Pak hari jumat kita, udah itu ya. Bu besok kan? Besok menyampaikan kepada Banggar hasil rapat hari ini. *Nah*, oleh karena itu kalau boleh lanjut, tiada salahnya ini rapat saya lihat, tidak ada salahnya sama sekali. Persoalan mekanisme bahwa Banggar harus apa, tadi kan sudah melalui Paripurna. Mana lebih kuat antara Paripurna dengan Banggar? Lebih kuat Paripurna. Oleh karena itu saran Pak Jhonni Allen tadi harusnya menjadi keputusan kita untuk lanjut pada kesempatan ini, terima kasih Pak Ketua.

**F – P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Pimpinan Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, silakan.

**F – P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Iya,

**Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V,  
Pak Menteri dan seluruh jajaran.**

Saya kira kita, kita berdebat dengan masalah yang tidak ada artinya sama sekali. Yang membuat konsen kita untuk membahas sesuai dengan amanat undang-undang yang melekat kepada kita itu kita bubar semuanya. Penambahan ini baik, kalau pengurangan yang kita ribut gitu iya kan? Kenapa kita harus ribut soal penambahan ini iya kan? ini cuma pemberitahuan saja gitu kan.

Tapi apakah penambahan ini ada manfaat untuk kita sesuai dengan amanat undang-undang, mohon maaf Pak Jhonni, mohon maaf. Jangan kira kita ini Anggota Dewan ini minta-minta seakan-akan *break* untuk ada Anggota Dewan minta jatah. Gak ada itu, itu amanat undang-undang yang harus kita lakukan agar ada ruang untuk kami berbicara dengan Pak Menteri dengan jajaran, ya kan. Kami harus berdiskusi dulu dengan baik, ya kan, di mana posisi kita untuk membawa aspirasi rakyat di daerah kita ini, ada nggak? Ya, kan, karena kami diamanatkan itu. Kami reses ke daerah, kami kunjungan kerja kunker segala macam itu sudah masuk belum itu semuanya? Menurut saya kalau lihat ini belum ada tercantum di sana, masih banyak sekali, ya kan. Selalu kami bawa map segitu banyak, tidak tahu map itu ke mana semuanya, tidak ada di dalam sini. Kalau kemarin kan kita jelas, ya kan.

Saya kira mekanisme yang kami lakukan kemarin itu semua sudah itu yang harus kami lakukan juga. Jangan satu Menteri ini lain, Menteri ini lain, ini

lain, nggak ada, semua harus dilakukan seperti itu, ya kan, ada ruang untuk kami bisa duduk Bersama, ya kan. Karena kami susah bertemu dengan Pak Menteri ini, rapat itu terbatas sekali, ya kan. Bahas anggaran kalau ada lebaran, apa natura apa dan lain sebagainya baru kita bisa rapat cuma masalah itu. Sedangkan kita tidak bisa duduk bersama masalah-masalah kita apa di Dapil kita. Yang harus bisa kita rapat selalu dengan Pak Menteri berdiskusi sebagai mitra untuk penguatan Pemerintah, kehadiran Pemerintah di daerah kami sebagai Anggota Dewan. Itu yang kurang kami lakukan selama ini, ya kan, kami waktunya terbatas ini, ya kan.

Kalau bicara 2023 masih waktunya sampai tanggal 9, 2021 besok akan disampaikan di Paripurna 2022, ini yang harus kita bahas. Jadi, kalau kita mau bahas ini saya minta kita bahas hanya 2021-2022, 2023 kami harus bertemu dulu dengan Pak Menteri, kami diskusi dulu. Setelah ada kesepakatan kita bersama bagaimana Pemerintah dan DPR, ya kan, Pemerintah dan DPR ya kan, bukan dengan saya pribadi. Pak kami pribadi, tidak, DPR kami DPR baru kami lanjutkan pembahasan ini.

Saya kira itu, jadi kalau kita mau bahas saya usulkan kita bahas hanya dua poin itu. 2021-2022 karena masih banyak masalah-masalah yang kami akan sampaikan terhadap pengelolaan dana 2022, terutama di daerah kami, ini banyak sekali masalah yang kami dapat waktu kami kunjungan kerja dan apa kunker resmi dari komisi yang kami bawa ke daerah kami. Itu Pimpinan, terima kasih.

**F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):**

Izin Pimpinan, skorsing saja sementara dulu.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar sebentar, Pak Ridwan mau sebentar.

**F – P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya kira begini, kalau kita bicara soal undang-undang bahwa pembahasan aspirasi kita di Dapil. Kan di ruangan ini juga bisa Pak, kenapa harus bicara harus kita rapat khusus, harus ketemu khusus. Ruangan ini bisa disampaikan aspirasi Bapak dan Ibu semuanya dan saya yakin Menteri juga akan menangkap itu, tidak pernah membatasi juga Bapak-Bapak dalam rapat kita di sini. Jangan terkesan kecuali kita mau rapat khusus baru satu tuntas, pembahasan anggaran. Yang kita forsir sekarang keputusan kita adalah bicara persoalan legalitas kalau kita lanjutkan atau tidak ini, itu dulu yang perlu kita bicarakan Pak, jangan berbicara yang lain.

Apakah ini legal kalau kita teruskan atau tidak? Kalau menurut penjelasan Pak Menteri tadi dan saya juga tangkap betul bahwa di mana salahnya? Tidak ada yang salah kalau persoalan ini kalau misalnya kita

lanjutkan, iya kalau kita lanjutkan di mana salahnya. Oleh karena, Pak Presiden melalui nota keuangan telah menyerahkan kepada DPR RI melalui Paripurna, Paripurna terus ke kita di sini persoalannya. Banggar mau menyampaikan kepada kita agar kita segera membahas mulai tanggal 24 sampai 25.

Oleh karena itu, sekarang kita mulai bahas, nah di mana persoalannya, kita lanjut Pak Ketua, kita lanjut sebagaimana nanti kalau misalnya ada masalah yang kita hadapi seperti ketidaklaziman tadi, ya kita sampaikan kepada Banggar. Kemarin sudah memutuskan juga Perhubungan, bagaimana mungkin kita batalkan semuanya, nanti juga menyampaikan kepada Banggar bahwa ada perjalanan seperti yang terjadi pada kesempatan ini.

Tidak usah lagi kumpul-kumpul, apa namanya, tarik kemudian kita rapat khusus terus 10 menit 20 menit. Ruang ini juga terbuka untuk kita bicarakan persoalan ini Pak, terima kasih Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ya sebentar saya rasa Ketua juga boleh bicaralah.

**F – P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Iya, Pimpinan. Sebelum Pimpinan saya ingin tanggapan biar kita lebih fokus.

**KETUA RAPAT:**

Iya silakan habis ini saya.

**F – P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Saya minta kepada kita, kalau begitu kita *break* biarkan Kapoksi dulu semuanya. Setuju nggak?

**F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Setuju Pimpinan.

**F – P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Kapoksi kita duduk, apakah Kapoksi kita mau lanjut apa tidak nanti kita duduk di sana. Kalau tidak, maka saya minta Ketua tanyakan per fraksi setuju nggak kita lanjutkan apa kita *break*, tanyakan per fraksi, silakan.

**KETUA RAPAT:**

Baik jadi begini, jadi begini. Pertama saya mau luruskan dulu karena ini terbuka Pak, ya rapat ini direkam loh, ya direkam. Pimpinan saya tegaskan tidak pernah menghalangi siapapun bicara apa di ruangan ini. Pimpinan tidak pernah melarang siapapun mengusulkan apa di ruangan ini.

**F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Izin, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ini harus saya *clear* dulu.

**F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Saya mau bicara Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar sebentar.

**F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Izin Pimpinan, saya mau bicara Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar sebentar Pak Dewo.

**F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Saya bisa,

**KETUA RAPAT:**

Sebentar sebentar.

**F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Punya hak untuk memotong.

**KETUA RAPAT:**

Nggak sebentar.

**F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Pimpinan bicara.

**KETUA RAPAT:**

Kemudian, oleh karenanya seluruh usulan boleh disampaikan terbuka. Ya, itu saya sampaikan itu *clear* dulu soal aturan main ini, kita bicara aturan main dulu ya. Kita bicara aturan main, bicara undang-undang, bicara tatib.

Pimpinan tidak pernah menghalangi siapapun. Catatan, usulan, dan seterusnya dari Dapil perorangan Pak Menteri biasa terima di sini, nggak pernah dihalangi, siapa yang minta kita selalu kasih tempat, nggak pernah kita halangi.

Bahwa kadang-kadang kita perlu mungkin ya udah karena terlalu berat kita ngumpul *it's okay* biasa juga kita lakukan, nggak masalah Pak, ya nggak masalah. Kemarin juga Pimpinan tidak larang kok, ya toh, ini belum sampai Pak ini kita belum tuntas sampai pada titiknya itu lho, semua fraksi belum bicara. Semua bicara dulu terkait soal yang prinsip ini terkait aturan main, kan kita belum putuskan ini. Bahwa nanti aturan main ini kita sepakati dulu Pak, soal nanti misalnya pembahasan 2023 kita perlu bagaimana, perlu rapat poksi dulu, ya kita rapat poksi dulu lah, nggak Pimpinan melarang juga.

Tapi, yang tadi kita sepakati dulu soal tambahan tadi loh Pak, itu prinsip, ini soal bernegara. Mohon maaf nih Pak Jhonni, ini soal bernegara Pak. Ya kan, ya saya sudah bicara tadi di awal. Jangan sampai nanti misal 135 Miliar yang dari Basarnas ternyata suatu hari ada masalah, ditanya loh Pak, asal-usulnya dari mana tambahan itu, kan begitu Pak. Maka Pimpinan mengantisipasi sekarang, ini asalnya darimana 135, oh dari nota keuangan karena di kesimpulan rapat tidak ada, di rekaman rapat tidak ada, inikan begitu, dan menyimpang dari kebiasaan kita pembahasan di DPR. Kenapa Komisi menetapkan tanpa Banggar, ini kan harus jelas, Pak.

Itu yang saya minta setuju dulu Pak, jangan loncat ke sana. Kalau ini bisa kita setuju bahas seperti Perhubungan kemarin, biarkanlah angka ini nanti kita tetapkan sama. Soal nanti berubah di Banggar, berdasarkan surat yang kita surati ke Banggar, itu kita sepakati dulu. Setuju ya? Gitu saja kok susah sih ah, aduh.

**(RAPAT: SETUJU)**

*Nah*, sekarang soal rapat Poksi, ayo kita rapat Poksi dulu. Pak Menteri biar kami rapat Poksi dulu, saya harus dengar juga nggak papa kita rapat Poksi dulu tapi tidak dengan Pak Menteri ya. Kita rapat Poksi saja, rapat Poksi boleh *dong*? Nanti rapat Poksi bagaimana, kita sepakati. Baik Pak Menteri kita rehat 10 menit, kami Pimpinan bertemu dengan Poksi dulu. Ya, rehat 10 menit.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 11.50 WIB)**

Baik.

**Bapak Ibu sekalian,  
Pak Menteri. Skors saya cabut,**

**(SKORS DICABUT PUKUL 12.30 WIB)**

Terima kasih.

Setelah kita melakukan rapat konsultasi antar fraksi, Pak Menteri, kami laporkan. Tadi pembicaraan terkait soal padat karya Pak, ya, padat karya. Tadi disepakati nanti Komisi mengusulkan Pak. Sebetulnya di usulan Pak Menteri di sini kan 14 koma sekian ya, tadi saya bacakan saja nanti tadi angkanya, nanti pastinya sedang diketik Pak Menteri, 11,5 Pak. Jadi lebih kecil malahan dari angka yang disampaikan oleh Pemerintah. Namun karena tapi 11 koma sekian ini kan tidak termasuk yang Bina Marga, Pak.

*Nah*, tinggal teknis tentu nanti kami serahkan sepenuhnya kepada Kementerian untuk melakukan *exercise* Pak, bagaimana menyikapi terkait dengan usulan ini. Intinya demikian nanti sekarang sedang dirapihkan hasil tadi rapat konsultasi dirapihkan nanti akan diserahkan secara resmi di forum ini.

Teman-teman sekalian tadi demikian dari unsur Poksi tadi yang rapat tentu sudah menyimak semua, ya, apa yang tadi kita sepakati di rapat konsultasi. Mungkin Pak Ridwan kalau saya ada yang keliru, mungkin ada yang perlu disampaikan? Pak Tamliha betul ya demikian tadi kan? Baik.

Teman-teman sekalian barangkali itu yang sudah kita sepakati terkait dengan padat karya. Karena hal terpenting dari rapat ini sudah kita sepakati dan segera akan kita serahkan dengan Pak Menteri, mungkin usul saya ya tidak ada hal lagi yang perlu panjang-panjang, gituloh. Karena nanti kita penajaman dengan Direktorat Jenderal, Pak. Karena Pak Menteri hari ini ada ratas juga terkait dengan digitalisasi, tadi Pak Menteri sudah memohon kepada kita. Usul kita Pak Menteri terima, kemudian kita tidak memberi ruang kepada beliau ya tentu tidak *balance* kan gitu. Saya usul kalau memang bisa kita persingkat, ya kita jangan diperpanjang lagi karena ini sudah kita sepakati dan angkanya pun tadi menurut saya masuk akal gituloh, ya.

Hanya mungkin sedikit kesulitan di Kementerian Pak Jhonni, terkait dengan mungkin akan ada sedikit pergeseran di Kementerian. Cuma kan ini saya yakin Pak Menteri tadi pun menyampaikan sudah memberi sinyallah kepada kita bisa melakukan itu untuk, sebagai bentuk kemitraan antara Komisi V dengan Kementerian PUPR, kita kasih *applause* dulu lah ya.

Kalau itu sudah cocok mungkin tidak ada tambahan?

**F – P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):**

Izin Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Cukup ya kita ke kesimpulan rapat.

**F – P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):**

Izin Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Iya Pak.

**F – P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):**

Saya mau menyerahkan saja ini.

**KETUA RAPAT:**

Silakan yang mau diserahkan silakan, Pak.

**F – PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ., M.M.):**

Izin Pak mungkin diberikan kesempatan untuk yang bawa map untuk menyerahkan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F – PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ., M.M.):**

Itu langsung biar cepat.

**KETUA RAPAT:**

Iya saya persilakan Bu.

**F – PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ., M.M.):**

Iya.

**KETUA RAPAT:**

Saya persilakan, bagi yang membawa map saya persilakan, karena saya juga bawa map hari ini. Saya punya mana tadi ya, tolong minta izin staf saya ya, di luar minta tolong. Saya punya map juga mau *tak* serahkan hari ini.

**ANGGOTA KOMISI V DPR RI:**

Kalau lupa bawa map kapan bisa dikasih Pak Menteri? Gimana kita sudah mulai pelupa ini, Pak Menteri.

**KETUA RAPAT:**

Iya, kan masih ada nanti kita raker. Hari senin kita RDP mungkin hari senin paslah dengan Pak Sekjen kan, nanti silakan mungkin yang dengan tidak Pak Menteri hari ini, *nuwun sewu* Pak Menteri ya mungkin nanti dengan Pak Sekjen hari senin ya, masih ada kesempatan kita untuk hari senin, eh selasa



sorry Selasa, jadwal dengan Pak Sekjen hari Selasa. Selasa ya, iya hari Selasa. Senin apa hari Selasa ?

**F – P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN S.IP., M.P.):**

Sedikit Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ini Sekretariat suka kasih info salah ini kacau ini. Baik, sebentar-sebentar. Hari Senin Pak, setelah jam 10 pagi hari Senin ya, silakan nanti hari Senin jadi satu-satu dulu kita pilah-pilah dulu. Supaya nyambung maksud dan tujuan semua ya. Kemudian, Pak Sigit hari Senin Pak ya, Senin Pak ya, oke yang belum nanti hari Senin.

Tadi Pak Irwan izin satu menit, Pak Jhonni satu menit silakan, supaya cepat kita mau ke kesimpulan rapat ini. Silakan Pak Irwan.

**F – P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN S.IP., M.P.):**

Baik terima kasih, Pimpinan.

**Pimpinan Komisi V yang saya hormati dan rekan-rekan Komisi V yang saya banggakan,  
Pak Menteri PUPR, Pak Basuki yang saya hormati dan cintai,  
Para Dirjen, Pak Direktur beserta seluruh jajaran Kementerian PUPR yang saya hormati,**

Saya cuma mau mengajak apa namanya membuka ruang diskusi dalam men-*create* kegiatan untuk RKA 2023. Tadi, lihat, saya lihat di Kaltim apa namanya di pemaparan PUPR apa namanya ada anggaran yang fokus pada IKN 5,4 Triliun. Tapi jujur saja saya begini, di IKN kita bangun jalan, embung untuk persemaian, air baku di Sepaku, pengendalian banjir di Sepaku, Istana Presiden, air bersih.

Saya cuma ingin mengingatkan Pak Menteri, bahwa IKN ini hanya ada di, saat ini ada di Sepaku, Sepaku itu sebuah Kecamatan yang penduduknya 31.000. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa 10 Kabupaten di Kaltim itu juga butuh prioritas. Contohnya, kemarin Pak Menteri sudah janji untuk menangani banjir yang ada di Sengata, ini sudah mau masuk November saya pasti akan terdampak banjir lagi. Minimal ada beberapa yang memang saat ini longsor dan nanti perlu penanganan penguatan tebing Sungai ya di situ sehingga air juga tidak masuk dari pemukiman padat itu.

Kemudian terkait air bersih, kemarin Bupati Makamulu, sebuah Kabupaten di perbatasan Republik Indonesia di Kaltim dengan Malaysia, sampai sekarang belum punya air bersih. Mereka masih mengonsumsi air dari Sungai Mahakam yang sudah keruh akibat hutannya ditebang, tanahnya ditambang. Menurut saya juga cukup adil kalau kita bisa bangun IKN Sepaku ini dengan cepat. Tetapi di sebuah kabupaten ini juga kita bangun apa

namanya SPAM air bersihnya. Kami juga berterima kasih karena PUPR terus membangun jalan lintas nasional yang menghubungkan Kutai Barat ke Mahakam Hulu ini dan itu juga membantu Mahakam Hulu tidak terisolir dari kabupaten lainnya.

Harapan kami agar pengendalian banjir dan SPAM air bersih untuk Mahakam Hulu dan pengendalian banjir di Sengata ini bisa dilaksanakan tahun depan, kami lihat di dalam dokumen ini belum ada. Dan itu hanya mengingatkan karena ada apa namanya, ada apa namanya janji itu utang, jangan sampai Pak Menteri sudah luar biasa kerjanya tetapi kemarin sudah menyampaikan akan menangani banjir Sangata ini terlupakan.

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik sudah ditangkap, banjir Sangata. Pak Jhonni, silakan.

**F – P. DEMOKRAT (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.):**

Baik.

Pak Menteri ini terus terang saja revitalisasi Pasar Balerong Balige ini Anggaran Tahun 2020-2021 ya, kurang lebih 23,5 Miliar. Sampai sekarang belum, Pemda belum mau menerima serah terimanya, kenapa? Karena konstelasi daripada pembangunan itu, tidak, apa, perencanaanya tidak pernah disinkronisasikan sehingga banyak kesalahan-kesalahan dan saya sudah ke sana, contohnya misalnya saya sudah lihat.

Pedagang ikan, pedagang daging, sama pedagang sepatu, dan pedagang kelontong sama bentuknya pakai meja beton itu. *Nah*, sehingga mereka berpikir begini, apakah mereka bisa bongkar atau tidak, masalah nggak? *Nah*, yang kedua soal apa namanya, pipa-pipa air IPAL-nya semua masih rusak, sehingga nggak bisa digunakan.

*Nah*, oleh karena ini saya mohon segera ini bisa dibetulkan ini Anggaran Cipta Karya sehingga serah terimanya itu bisa diterima oleh Pemda Kabupaten Tobasa. Sehingga dengan catatan saya sampaikan di sini, pedagang yang paling utama menempatkan adalah pedagang lama, nggak boleh ada pedagang baru, kalau nggak ribut. Kalau ada sisa kiosnya silakan, tapi paling utama saya tekankan pedagang-pedagang lamalah yang punya berhak dulu. Karena itu kan sudah, tempat dagang bukan baru itu, itu tempat dagang lama direvitalisasi menjadi baik kan kira-kira gitu. Kalau begitu intinya Dirjen Cipta Karya untuk segera bisa diselesaikan dan bisa diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tobasa.

Karena ini menyangkut jumlah pedagang yang sudah pada, ini ya, pedagang-pedagang kecil kurang lebih sekitar 1.000 KK. Terima kasih, Pak

Menteri atas perhatiannya dan mudah-mudahan setelah rapat ini, penyampaian saya ini bisa segera dilaksanakan, terima kasih.

**F – PAN (H. BOYMAN HARUN, S.H.):**

Ketua.

**F – PDIP (Dra. SRI RAHAYU):**

Izin, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Iya bentar-bentar, satu-satu nanti saya kasih kesempatan. Silakan, Pak Boy.

**F – PAN (H. BOYMAN HARUN, S.H.):**

Terima kasih Ketua.

Langsung saja, sebelumnya Pak Menteri saya ucapkan terima kasih dengan SDA yang sudah menyelesaikan pembangunan embung berkaitan air baku di Desa Banjarsari Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Tetapi, untuk saluran ke rumah-rumah warga belum, Ibu Cipta Karya, mohon kiranya embungnya sudah selesai dibangun, untuk mengalirkan airnya ke rumah-rumahnya itu segera dibangun di tahun depan. Berpuluh-puluh tahun sudah menunggu Bu, tinggal Cipta Karya yang menyelesaikan untuk mengalirkan kerumah.

Terima kasih, Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Bu Sri, Bu Sri, silakan Bu Sri Rahayu.

**F – PDIP (SRI RAHAYU):**

Terima kasih, Pimpinan.

Yang pertama saya ingin mengingatkan drainase yang dibuat padat karya itu sangat bagus. Tetapi, Bapak Ibu sekalian, ketika membangun ini mungkin juga perlu siapa yang bertanggung jawab ini. Itu tanah-tanah galian yang dari drainase itu berada di sampingnya, sehingga sekarang ini justru kembali lagi menutup drainasenya. *Nah*, oleh karena itu terutama yang saya tahu di Dapil saya di Kabupaten Kediri itu sangat panjang sekali. Tolong itu dicek karena tanahnya itu, ke ini semua, menutup drainase yang ada.

Kemudian yang kedua Pak Ketua, kaitannya dengan IKN ini usul ke depan, IKN inikan antara lain juga dibangun masjid. Dan, IKN-nya tuh gedungnya, istana negara itu kan menggunakan burung garuda ya ininya kalau

saya melihat maketnya itu yang disampaikan itu, itu kan melambangkan Bhinneka Tunggal Ika.

Mohon dengan hormat dan sangat ke depan, kita ini punya agamanya banyak mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, kemudian satu lagi kepercayaan. Tolong itu sebagai simbol dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ke depan juga harus ada. Sehingga dengan adanya perpindahan Ibukota ini menunjukkan bahwa Indonesia itu memang Bhinneka Tunggal Ika, yang selalu menjadi kurang perhatiannya adalah aliran kepercayaan. Di Kalimantan itu aliran kepercayaan juga banyak banget, oleh karena itu perlu mendapat perhatian. Mereka membutuhkan tempat untuk bertemu juga.

*Nah*, untuk itu ke depan ini kan baru masjid yang dibangun, tolong semua rumah ibadah khususnya di lingkungan itu juga harus mendapatkan perhatian yang sama. Sehingga burung garuda ini betul-betul kebhinekaan ini betul-betul diimplementasikan secara baik. Terima kasih, Pimpinan.

#### **ANGGOTA KOMISI V DPR RI:**

Pak Ketua.

#### **KETUA RAPAT:**

Sebentar-sebentar, satu-satu. Pak Tamanuri dulu biar *clear*. Saya lihat tadi yang angkat, sebentar Pak.

#### **F – P. GERINDRA (Drs. H. MULYADI, MMA.):**

Di kanan Pak, habis itu kanan lagi Pak Ketua, Pak Suryadi.

#### **F – P. NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M.):**

Makasih, kelihatannya berdasarkan umur Pak ya. Adil sekali Pak Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang terhormat Pak Pimpinan beserta Anggota,  
Yang kami banggakan Pak Menteri beserta Pak Dirjen, Sekjen dan Para  
Eselon II,**

Kami nggak banyak-banyak yang kami sampaikan. Hanya menyampaikan, karena sekarang ini kelihatannya di daerah Baturaja itu sudah efektif digunakan untuk latihan tempur. Bukan saja untuk level Indonesia tetapi juga dari luar negeri. Dan, oleh karena itu ini dari luar negeri pun dalam latihan tempur itu membawa alat-alat berat seperti Tank segala macam. Dan kalau tidak keliru kami, bahwa ada di antaranya Tank itu sampai 60 ton.

*Nah*, ini sesuai dengan pengamatan kami bahwa jembatan-jembatan kita yang sudah ada ini, ada di antaranya mungkin yang tidak kuat untuk menopang peralatan-peralatan ini. Antara lain yang ada di daerah Lampung, saya nggak berbicara daerah Baturaja Pak Eddy. Di daerah Lampung itu adalah Jembatan Waisapu, itu sudah mulai rusak, kemudian dimohonkan untuk supaya juga ditambah duplikat, itu satu.

Yang kedua, ini beberapa hari yang lalu masyarakat di Lampung Timur, di sekitaran Bendungan Jabung, Waijabung mengadakan percobaan untuk ngisi air ke sawah-sawah mereka dari Bendungan Jabung itu. Ini padi sudah hampir menguning, akibat percobaan itu habis 150 Hektar, nggak tahu kenapa ini. *Nah*, ini mohon dapat perhatian dari Pak Menteri. Saya rasa demikian Pak, makasih.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik sekarang ke sektor kanan, ya, Pak Syahrul.

**F – PKS (H. SYAHRUL AIDIL MAAZAT, L.c., M.A.):**

Makasih Pimpinan.

Saya tiga saja, yang pertama langsung. Ada aspirasi kontraktor Pak, untuk APBN khususnya sampai ke kami. Pertama karena kenaikan harga BBM. Kemudian, yang kedua harga aspal yang terjadi, mohon kebijakan daripada Menteri PU tolong disampaikan dalam rapat katanya, saya sampaikan pada kesempatan ini. Secara teknis saya tidak begitu paham, tetapi apa kebijakan untuk penyesuaian agar para pihak ketiga ini tidak mengalami kerugian dalam melaksanakan kegiatan APBN ataupun APBD.

Yang kedua adalah saya kemarin berkunjung ke Kabupaten Kuantan Singingi, mereka mengucapkan terima kasih atas reservasi jalan lebih kurang 320 Miliar di sana. Cuma ada jembatan gantung yang dibangun Tahun 2019 Pak Menteri dan memang sudah serah terima ke Kabupaten. Hanya saja jembatan gantung ini tanahnya bergeser, sehingga itu tidak bisa lagi difungsikan, nggak bisa dipakai sudah ditutup. Kata mereka kami tidak mampu untuk memperbaiki ini, ini perlu turun tangan dari Kementerian PU, jadi sekarang sudah ditutup jalannya.

Yang kedua adalah sekarang sedang berlangsung pacu jalur *event* menjadi *event* nasional yang kemarin dihadiri Menteri Pariwisata. Kemarin beberapa tahun yang lalu kita usulkan itu untuk perbaikan skala kawasan, Pak, ingin *event* ini akan menjadi *event* nasional dan mohon perbaikan kawasannya itu sekarang kondisinya kumuh.

Kemudian yang ketiga adalah tadi secara persuasif, personal, sudah saya sampaikan kepada Pak Menteri yaitu daerah Inhil sebagai pemasok dan penghasil kelapa dunia, bukan hanya kelapa di Indonesia, yang sekarang itu ratusan bahkan sampai ribuan hektar mereka harus kelapanya itu terjun ke laut

akibat abrasi. Mohon penanganannya sama seperti penanganan yang ada di Pantai Bengkalis dan Rupat. Yaitu melalui SBSN sehingga dananya bisa lebih banyak.

Gitu saja, terima kasih.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**ANGGOTA KOMISI V DPR RI:**

Izin, Pak Ketua.

**ANGGOTA KOMISI V DPR RI:**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar sebentar, Pak Mul silakan Pak Mulyadi.

**F – P. GERINDRA (Drs. H. MULYADI, MMA.):**

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan beserta Anggota yang saya banggakan,  
Pak Menteri beserta seluruh jajaran,**

Ini saja Pak, saya mengingatkan tentang komitmen penyelesaian Cisumdawu, Pak. Mudah-mudahan bisa betul-betul terealisasi tahun ini termasuk saya sudah dengar akan dibuka juga akses ke Patimban, Pak. Namun demikian kami berharap dari Kementerian PUPR bisa melakukan sinergi Pak, untuk membantu revitalisasi dan memanfaatkan Bandara Kertajati Pak, kalau Cisumdawu jadi Kertajati harusnya lebih optimal, Pak.

Kalau berkenan Pak, kalau zaman dulu ada asrama haji Pondok Gede dengan Embarkasi Halim. Saya tidak terbayang kalau kita punya Embarkasi Kertajati di mana di sana dibangun semacam pusat haji dan umrah Pak, ada miniatur Masjidil Haram, miniature Nabawi bahkan Jabal Uhud dan segala macam Pak. Jadi, jamaah yang belum terbiasa atmosfer tanah suci bisa dibuat di sana Pak. Saya sudah *sounding* ke Pak Gubernur karena 80% saham Kertajati adalah milik Jawa Barat dan beliau sangat merespon baik Pak, selama dari pusat men-*support* dan saya sudah *sounding* juga dengan Wakil Ketua MPR Pak Muzani beliau akan sampaikan juga ke Menteri Agama, Pak.

Mudah-mudahan *legacy* Bapak, untuk membuat pusat haji dan umrah Indonesia di Kertajati bisa terjadi Pak, karena luasnya lebih dari 1.000 Hektar Pak. Dan itu menjadi ikon Indonesia baru saya kira, disamping menjadi destinasi religi.

Kemudian, Pak, saya tetap harus menyuarkan Dapil Pak, saya berharap tol dulu kawasan itu disebutnya Bopuncur Pak, Bogor-Puncak-

Cianjur. Mudah-mudahan di zaman Bapak ada tol Bopuncur Pak, untuk mengatasi kemacetan Puncak Pak. *Rest area* puncaknya Pak, mubazir Pak, puluhan miliar dibangun sekian tahun belum dibuka Pak. Saya mengikuti waktu sabtu-minggu seperti itu Pak, banyak kaki lima yang akhirnya di kiri-kanan jalan Pak, karena masyarakat capek. Akhirnya mereka kesulitan untuk sekedar istirahat dan mencari toilet bahkan beribadah Pak, tapi di dalam sudah ada masjid segala macam. Saya lihat ke dalam Pak, jadi saya kira harus segera dibuka Pak, supaya tidak mubazir.

Kemudian akses ke jalur selatan Pak, mohon izin saya ada koordinasi dengan Pemprov bahwa jalur selatan sabtu-minggu nanti akan dijadikan ikon untuk Jabar *Cycling*, Pak, untuk wisata sepeda apa *roadbike*, Pak. Nah, saya kira juga akses-akses konektivitas menuju jalur selatan juga menjadi perhatian Bapak.

Terakhir Pak, mudah-mudahan CBX Ciawi tidak masuk ke *statement* Bapak bahwa tidak ada lagi proyek ke depan untuk infrastruktur kecuali perintah Presiden, Pak. Mudah-mudahan (suara kurang jelas) tetap dilaksanakan Pak Menteri, terima kasih Pak.

Izin Pak Ketua, terkait IKN teman-teman banyak bahas, saya di Banggar juga, saya menyuarakan ke Pimpinan Banggar supaya Kepala Otorita IKN diundanglah di Komisi V. Kita harus tau *action time*, *roadmap* serta *time frame* nya Pak Ketua. Kenapa? Karena kalau sudah ada usulan anggaran dialokasikan dari Kementerian PUPR, kita harus tau *goal*-nya, kita harus tahu target dan *timetable*-nya. Saya kira itu Pimpinan, terima kasih.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**ANGGOTA KOMISI V DPR RI:**

Pimpinan.

**ANGGOTA KOMISI V DPR RI:**

Izin Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Oke saya putar Pak, tenang saja.

**ANGGOTA KOMISI V DPR RI:**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Pak Mul, untuk Kepala Otorita karena belum, tadi saya sudah bicara dengan Pak Rahmat Gobel ketika di sini. Mohon Pak Rahmat saya bilang untuk Kepala Otorita itu mitra kerja Komisi berapa? Tadi beliau janjikan akan dibahas

dulu di Rapim. Nanti ditetapkan mitra kerja Komisi berapa Pak, baru nanti kita sikapi apa yang tadi Bapak sampaikan. Sekarang Pak Sigit, silakan Pak Sigit.

#### **F – PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):**

Terima kasih Pak Ketua.

Lama sekali tidak ketemu Pak Menteri itu rasanya tidak ngomong itu bagaimana gitu ya. Ini bukan persoalan Dapil, karena kalau urusan Dapil sudah ada Pak Eddy, ada Bu Diana, ada Pak Jarot, dan seterusnya, sudah dibereskan sama beliau-beliau itu Pak. Saya mengingatkan persoalan yang lebih besar, tentang *Mutual Recognition Agreement*. Kita sudah gembor-gembor dulu masyarakat ekonomi ASEAN dan kita pingin segera masuk ke dalamnya dengan mensertifikasi tenaga-tenaga profesional kita.

Pak Menteri Undang-Undang Arsitek sudah diketok, bahkan Pak Menteri sudah melantik Dewan Arsitek. Cuma ada yang macet di tengah jalan, dan sekarang sudah Tahun 2022. Undang-Undang Arsitek itu Tahun 2017, sudah lima tahun ya, Bu Dirjen Cipta Karya. Ada 2.762 STRA yang tidak bisa berprofesi sebagai arsitek, karena dia harus me, dia harus menyesuaikan dengan aturan untuk kembali ke apa SKA begitu, Pak Menteri.

Saya sebetulnya sangat kecewa, kenapa mestinya ini domain yang harus bisa diselesaikan di Kementerian PUPR. Tetapi, betapa lama menyelesaikan ini gitu. Kalau ada ketidaksetujuan dari salah satu *stakeholder* di Kementerian PUPR, mestinya mereka melihat bahwa dulu ketika undang-undang ini dibuat, itu dihadirkan berbagai *stakeholder* termasuk di antaranya dari Kementerian PUPR ya. Ada wakilnya, bahkan dipimpin oleh salah satu Dirjen. Kok, dalam pelaksanaannya dalam aturan-aturan turunannya justru tidak *matching* dengan Bina Konstruksi, antara Cipta Karya dengan Bina Konstruksi.

Saya kira ya, dihadapan Pak Menteri perlu saya sampaikan karena saya sudah menyampaikan sendiri ke Dirjen-Dirjen terkait. Kepada Pak Dirjen Bina Konstruksi dan kepada Bu Dirjen Cipta Karya. Mohon Pak Menteri, kalau bisa dalam tempo ya nggak lamalah satu bulan, apa-apa gitu bisa diselesaikan dengan baik bagaimana solusinya agar STRA ini tetap jalan karena ini *lex specialist* dan ini *Mutual Recognition Agreement*. Itu bunyinya itu, bahwa mereka itu butuh apa namanya kesetaraan ya apa sertifikat profesi yang setara yang bisa disetarakan dan itulah caranya begitu.

Oleh karena itu, saya sudah menyarankan kepada teman-teman arsitek ndak usah nyari proyek Pemerintah apa *oh sampean iku wis tuwek-tuwek ngono jik golek* proyek-proyek Pemerintah gitu. Tapi di daerah-daerah kan ndak bisa begitu, di Provinsi-Provinsi yang jauh di mana tenaga arsitek sangat kurang itu nggak bisa begitu juga. Akhirnya mereka terpaksa harus apa namanya, harus daftar untuk tender ke Pemerintah dan itu hambatannya. Mereka tidak bisa tender, yang punya STRA tidak bisa tender untuk dapat proyek. Nanti yang menang yang punya SKA tidak bisa mengerjakan karena yang mengerjakan harus punya STRA, gitu.



Jadi ini yang ingin saya sampaikan, terima kasih Pak Ketua agak panjang. Tapi, saya lega bisa bertemu dengan Pak Menteri dan Pak Menteri mengangguk-ngangguk *Insy Allah* berarti beres sebulan ini kira-kira. Terima kasih Pak Menteri.

**KETUA RAPAT:**

Teman-teman sekalian tanpa mengurangi rasa hormat, Pak Menteri tadi sudah minta izin ke kita ini kelihatannya bisa balik ke asal lagi kita ini. Saya mengingatkan saja ya, jadi saya ke kiri dulu, nanti tak putar kanan lagi kiri lagi. Bu Cen singkat, Bapak singkat. Ya silakan nanti kiri selesai, silakan Bu Cen.

**F – P. GOLKAR (CEN SUI LAN):**

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan,  
Teman-teman,  
Pak Menteri dan Ajudan,  
Eh,**

**KETUA RAPAT:**

Bu,

**F – P. GOLKAR (CEN SUI LAN):**

Dan jajaran, bingung Ketua disuruh cepat-cepat.

**KETUA RAPAT:**

Iya suruh cepat Ibu silakan dipercepat.

**F – P. GOLKAR (CEN SUI LAN):**

**Pak Menteri,**

Saya ingin menyampaikan Anambas itu kan pulau terluar, kemarin saya ke sana di sana sudah ada perguruan tinggi cuma tidak ada kelasnya. Jadi anak-anak itu kuliah dipinjam kelas di SMA. Jadi, Pak Menteri saya minta tolong dibantu bagaimana pengadaan kelas atau bagaimana. Karena kita tahu peningkatan SDM itu salah satunya juga untuk mengentaskan kemiskinan. Itu yang selalu kita bicarakan, jadi tolong ada solusinya.

Yang kedua Pak Menteri, juga saya bicara mengenai krematorium, tadi sudah bicarakan juga dengan Bu Dirjen. Tolonglah, Pak Menteri bagaimana solusinya. Terima kasih, itu saja Pimpinan, Pak Menteri, semua.

**KETUA RAPAT:**

Ya, Pak Fauzi silakan.

**F – P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):**

Iya makasih,

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

**Makasih Pak Ketua.**

Saya langsung saja yang pertama Pak Menteri saya ingin mengingatkan, di Luwuk Utara sudah ada Bendungan Baliase tadi sudah disebut tapi kurang belum sangat maksimal difungsikan. Nah, karena itu butuh perhatiannya, itu pertama.

Yang kedua, saya juga pernah menyerahkan dengan Pak Menteri. Daerah terpencil Seikurampi, mudah-mudahan itu juga di 2023 sudah bisa disentuh Pak Menteri.

Yang ketiga komitmen terhadap daerah bencana terutama di Luwu Utara pasca banjir, drainase kota, dan apa, sedimen Sungai Masamba dan Rongkong itu masih menjadi masalah tersendiri, hujan sedikit saja banjir. Karena dia sedimennya sangat apa, tidak dalam sekali.

Yang keempat ada jembatan gantung di tahun ini, sudah ditender cuma Pak Menteri ini pelajaran mungkin bagi kita semua. Pada saat perencanaan, karena ternyata dana yang ada ini tidak bisa meng-cover bentangannya. Sehingga dialihkan, nah dialihkan ternyata harus melewati tanah warga, tanah warga minta diganti. Nah, sementara dana penggantian itu tidak ter-cover dalam anggaran yang ada, gitu. Nah, ini mungkin pelajaranlah buat kita mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi.

Yang terakhir Pak Ketua, di Dapil saya di Enrekang dan Tanah Toraja ada kegiatan Padat Karya. Tapi, dikarenakan ada pergantian PPK-nya hampir saja itu hilang. Tapi, sekarang muncul lagi tetapi pengerjaannya panjangnya itu sangat jauh sekali dari rencana yang semula gitu. Nah, ini saya ingin tahu juga informasinya seperti apa sebenarnya, makasih Pak Ketua.

**F – PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):**

Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Baik yang teknis dengan Pak Direktorat Jenderal Dirjen nanti di-*pending* dulu, nanti kan kita dengan Dirjen juga. Silakan Pak, Pak.

**F – PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):**

Suryadi.

**KETUA RAPAT:**

Suryadi Jaya Purnama.

**F – PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):**

Baik terima kasih Pak Ketua.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

**Pak Menteri,**

Langsung saja, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Namun, sebelumnya saya mohon izin di kesempatan yang baik ini atas nama Majelis Adat Sasak, menyampaikan terima kasih kepada Pak Menteri kemarin sudah memakai busana adat Sasak, Pak, pakaian khas Lombok, terima kasih Pak Menteri.

Saya mengevaluasi salah satu kegiatan, sebetulnya ini nanti dengan Pak Irjen, ya. Karena ada pengaduan dari masyarakat, pengadaan air baku di Bendungan Penggel ke kawasan Mandalika, Pak. Itu dalam pelaksanaannya yang harusnya dikerjakan secara mandiri atau sendiri oleh PUPR atau oleh mitra kita. Tetapi ada proyek lain dari telekomunikasi yang numpang Pak, ini tidak sesuai dengan spek. Ada beberapa kilo, beberapa kilometer proyek telekomunikasi memasang pipa di galian kita, di galiannya PU dan sepertinya juga ini nanti akan menjadi masalah ketika perawatan pemeliharaan gitu ya. Kalau telekomunikasinya gali pipanya kita kena juga atau kalau kita ini mungkin perlu urusannya dengan Pak Irjen, supaya tidak jadi masalah ya. Karena memang sejak prosesnya juga ini ada masalah, jadi ini mungkin jadi catatan.

Lalu, berikutnya saya belum mengajukan secara tertulis Pak Menteri untuk 2023, karena tadi Pak Ketua akan kita bahas juga masih panjang ini. Tetapi, menjadi catatan saya adalah agar mengakomodir usulan-usulan tadi yang teman-teman sudah gagah di depan sidang menyerahkan map itu diakomodir secara proporsional. Karena kami juga punya daftarnya Pak Menteri, ada usulan-usulan Anggota yang sama sekali tidak diakomodir dan ada Anggota yang mungkin secara proporsional entah seperti apa ternyata tidak proporsional gitu.

Jadi ini catatan saja Pak Ketua, supaya usulan-usulan daerah, program-program ireguler, insidental yang dari Pemda atau dari masyarakat hasil kunjungan komisi, spesifik, kunjungan perorangan ya, supaya Pak Menteri punya daftar sehingga bisa dipantau keseluruhan Anggota Komisi V ini secara proporsional, walaupun tidak diakomodir tetapi jangan sampai ada yang diakomodir, ada yang tidak sama sekali, gitu.

*Nah*, ini harus ada keseimbangan dan keadilan, mungkin itu saja catatan Pak Ketua.

**F – PKB (H. IRMAWAN, S.Sos., M.M.):**

Pak Ketua sedikit, Ketua.

**F – PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):**

Adapun nanti dari kami akan kami serahkan secara khusus. Terima kasih Pak Ketua.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik Pak Syafiuddin dulu abis itu, Pak.

**F – PKB (H. IRMAWAN, S.Sos., M.M.):**

Pak Irmawan.

**KETUA RAPAT:**

Irmawan.

**F – PKB (H. SYAFIUDDIN, S.Sos.):**

Terima kasih Ketua.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

**Secara singkat saja Pak Ketua, Pak Menteri.**

Anggota Komisi V ini bukan hanya Pak Bakri, Pak Suryadi dan Bang Jhonni Allen. Jadi yang ditampilkan di layar monitor tadi itu kan beliau-beliau. Jadi, Pak Syafiuddin juga Anggota Komisi V, kapan ini Pak Presiden dan Pak Menteri untuk bisa hadir ke Madura dan saya bisa fotonya bisa ditayangkan di layar monitor ini Pak Menteri, itu yang pertama.

Ya terkait itu Pak Menteri, saya berharap bahwa ini ada titipan salam ke Pak Menteri dan jajaran PUPR dari segenap tokoh Madura, ada tiga tokoh Pak kalau di Madura ini ada ulama, ada umaro, ada blater. Yang ulama ini ada KH. Muhammad Faisal Anwar, ada Ketua Basra, KH. Rofii Baidowi, KH. Syafier Rofii, dan yang tokoh Umoro ini kan Pemerintah, Pak. Jadi empat Bupati di Madura ini sudah semuanya *welcome* Pak Menteri, tolong disampaikan ke Presiden untuk bagaimana pembangunan di Madura ini terus berkelanjutan sesuai dengan arahan Presiden pada waktu meresmikan jembatan Suramadu dan juga menggratiskan tol Suramadu itu.

Tokoh perantauan lagi Pak Menteri, ada tiga tokoh yang menurut saya juga kemarin juga beliau sangat *concern* bertemu dengan Ibu Gubernur dan beberapa Bupati di Madura seperti Abah Haji Rawi dan juga ada yang namanya Abah Haji Zaini dan juga ada juga pada waktu itu Haji Ahmad Zaini, beliau juga *concern* terhadap bagaimana Madura ini dibangun Pak Menteri.

Jadi, menurut beliau-beliau saya ini sudah tiga tahun menjadi Anggota DPR RI sama halnya dengan janji Presiden, di Perpres 80. Kalau kita dilantik Oktober 2019, Perpres 80 juga lahir pada Tahun 2019 itu. Maka dari itu sebentar lagi Pemilu Pak Menteri, saya ini sudah sangat dicurigai oleh para tokoh itu. Saya ini tidak bekerja, saya tidak menyuarakan aspirasi masyarakat Madura.

Kita terkait Perpres ambil yang sangat minim Pak Menteri. Kalau kita melihat posisi pelabuhan Tanjung Bulu Pandan dengan rencana anggaran 21 Triliun, itu sangat tidak mungkin dengan kondisi ekonomi sekarang. Kita ambil yang paling tengah, di situ ada pembangunan, rencana pembangunan Indonesia Islamic Center. Ini merupakan kalau berhasil Pak Menteri, Pak Menteri juga dapat pahala nantinya karena ini menjadi ikon Madura terutama kultur religius itu. Maka dari itu salam dari beberapa tokoh ini ke Pak Menteri, kita sepakat semua *stakeholder* ini. Tokoh ulama blater dan umaro ini sepakat untuk menerima pembangunan dari Pemerintah Pusat kapanpun beliau-beliau dipanggil oleh Pak Menteri, kapanpun beliau-beliau untuk diajak bertemu oleh Pak Menteri. Beliau juga siap untuk hadir dan siap untuk mengamankan apapun yang ada di Madura.

Saya pribadi berharap Pak Menteri sesuai dengan yang di monitor ini dua kali saya melihat, iri saya Pak Menteri. Bang Jhonni Allen sangat tampan, gagah, juga Pak Ketua dua kali saya melihat di monitor masa saya nggak pernah ditampilkan di monitor Pak Menteri. Mudah-mudahan maksimal 2024 kita ditampilkan di akhir jabatan.

#### **PESERTA RAPAT:**

Pak Ketua mau tanya, sudah selesai belum?

#### **F – PKB (H. SYAFIUDDIN, S.Sos.):**

Maka dari itu saya berharap kepada Pimpinan dan semua rekan-rekan Anggota Komisi V mari, Madura ini betul-betul menjadi daerah miskin ekstrim, dari lima Kabupaten di Jawa Timur, dua ada di pulau Madura.

Maka dari itu saya berharap semuanya (suara kurang jelas) bahasa Maduranya Pak Menteri, gotong royong ya. Kita sepakat untuk bagaimana Madura ini sama dengan daerah-daerah Kabupaten lain di Indonesia. Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

#### **F – P. NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):**

Pimpinan minta waktu.

**KETUA RAPAT:**

Baik, setuju kita Madura itu harus sama Pak, dengan seluruh wilayah lain di Indonesia. Habis Pak Irmawan, Pak Syarif, silakan.

**F – PKB (H. IRMAWAN, S.Sos., M.M.):**

Terima kasih,

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabaraktuh,*

**Yang kami hormati Pimpinan, Pak Menteri,**

Saya langsung saja nih Pak Menteri, kebetulan tadi malam kami ketemu dengan PJ Gubernur kami yaitu Gubernur Aceh. Menurut keterangan beliau beberapa waktu yang lalu Pak Gubernur juga sudah ketemu dengan Pak Menteri, terkait dengan pembangunan jalan dari Aceh Tenggara ke Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Dan, Beliau meminta ke kami agar program ini bisa dikawal, Pak. Menurut keterangan Beliau DID-nya dan Amdalnya juga sudah diserahkan ke Kementerian PUPR. Saya berharap di Tahun 2023 ini apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi bisa terakomodir di anggaran Tahun 2023 ini.

Kemudian selanjutnya Pak Menteri, pembangunan pengaman Pantai di Kampung Pasir tadi juga saya sampaikan ke Pak Djarot bahwa ini sudah 3 tahun berturut-turut kita kerjakan dan tahun ini kita harapkan bisa selesai, Pak. Kalau tidak kita lanjutkan di tahun ini saya khawatir apa yang sudah kita kerjakan selama ini akan mubazir karena tidak dapat difungsionalkan secara maksimal. Jadi, saya berharap di Tahun 2023 ini, bisa kita kelarkan pembangunan pengaman pasir di Kampung Pasir, Kota Melauboh Aceh Barat ini Pak.

Dan, selanjutnya juga kami berharap ada pengaman Pantai di Desa Pala Kerambe di Kabupaten Aceh Barat Daya, ini juga kita berharap kepada Pak Menteri, agar dapat dialokasikan di Tahun Anggaran 2023 ini karena sampai hari ini sudah banyak pemukiman yang tergerus kena abrasi oleh ombak laut.

Terima kasih Pak itu saja yang ingin kami sampaikan.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabaraktuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih. Pak Syarif silakan.

**F – P. NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):**

Terima kasih, Pak.

Ini kaitan dengan kebijakan kementerian, mungkin saya tepat disampaikan di Pak Menteri. Yang pertama berkaitan dengan ini, mungkin bantuan teknis kali, ya. Kaitan Pak, kebetulan kemarin Walikota Pontianak itu akan membangun jembatan yang akan dibangun oleh pihak swasta, antara jalan Rahadi Usman yang BNI itu sama ke Siantang. Investornya sudah ada Pak, tapi katanya harus mendapat persetujuan dari Kementerian. Maka untuk itu, mungkin nanti akan ada investornya untuk bersama dengan Pemerintah Daerah untuk menyampaikan hal itu. Jadi, kami mohon bantuan itu kaitan dengan karena mungkin itu nanti berbayar jembatannya itu tidak menggunakan Anggaran APBD, APBN.

Yang kedua, kemarin juga Pak Menteri bersama Presiden dan Pak Ketua Komisi sudah meresmikan pelabuhan, Pelabuhan Kijing, ya. Namun dengan demikian yang tentu menjadi harapan kami, bagaimana untuk mempercepat terhadap rencana jalan tol Pontianak-Kijing itu Pak. Dalam rangka untuk supaya paling tidak kalau ini nanti sudah semuanya resmi di sana, saya yakin itu sangat padat dan juga mohon dipercepat juga relokasi janji dari Pelindo berkaitan dengan renovasi jalan itu. Dan, kita berharap ini dipercepat karena sanitasi di pelabuhan di muara itu semakin hari semakin tinggi. Saya kira ini kita harapkan itu cepat sudah beroperasi di pelabuhan Kijing itu.

Kemudian terakhir saya berkaitan tadi menyambung berkaitan ada masih Pak, tapi tadi juga Bapak sudah jawab kaitan dengan masalah jembatan gantung yang sudah dilelang cuma Dipa Revisinya belum itu, kalau bisa dipercepat Pak. Supaya bisa realisasinya cepat, tidak apa waktunya juga dilaksanakan secara tepat. Terima kasih, saya kira itu Pak.

#### **KETUA RAPAT:**

Siap Pak Syarif, Pak Willem silakan.

#### **F – P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):**

Baik, Pak Ketua.

Saya, maaf Pak Ketua kalau saya kembali ke laptop, terkait dengan RKA K/L dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun 2023 ini. Kami melihat hampir mencapai 20 Triliun kepentingan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur IKN. Maka, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mul tadi bahwa, Pak Ketua perlu juga kita menghadirkan Ketua Badan Otorita IKN, supaya dalam setiap rapat dengan Kementerian PU maupun juga mitra yang lain. Perlu juga kami bisa mendapatkan informasi atau keterangan langsung dari Ketua Badan Otorita pembangunan IKN.

Terus yang berikut, ini senada dengan apa yang telah disampaikan Ibu Sri Rahayu tadi. Bahwa memang belum lama ini saya juga ikut menyelenggarakan salah satu kegiatan di titik nol IKN. Di sana kami menyelenggarakan apel kebangsaan yang mana menghadirkan delapan OKP

lintas keagamaan di seluruh Indonesia. Dan, di sana kami menyelenggarakan kegiatan apel kebangsaan dan menggaungkan juga pentingnya pembangunan IKN yang dimaksud.

Dalam kesempatan itu kami juga menggaungkan tentang agenda besarnya pembangunan miniatur keberagaman di titik nol IKN, Kalimantan Timur. Karena kami melihat keberagaman itu penting, karena itu adalah kekuatan kita, itu adalah identitas kita, itu adalah *dignity* kita. Sehingga, pembangunan miniatur keberagaman itu penting yang perlu dihadirkan di pusat pembangunan IKN ini. Dan, dalam konstruksi pembangunan miniatur keberagaman ini juga kami harapkan mengadopsi model konstruksi bangunannya itu benar-benar dari Nusantara, tidak harus mengadopsi model konstruksi bangunan dari luar. Supaya menghadirkan ciri khas Nusantara itu benar-benar hadir di sana.

Yang berikut Pak Menteri, berdasarkan laporan yang kami terima di Dapil perlu evaluasi juga keberadaan mitra kami di sana. Baik Balai maupun juga Satker di Provinsi Papua.

Dan, juga yang terakhir kami sampaikan terima kasih Pak Menteri sudah hadir di Nias. Karena hasil kunjungan kami, bukan kunjungan parlemen tapi kunjungan organisasi dan kami sudah mediasi Kepala Daerah sana sudah datang ke sini audiensi dengan Pimpinan dan Anggota dan ke Pak Presiden dan Pak Menteri sudah hadir di sana. Tentu ini sudah menghadirkan satu (suara kurang jelas) cinta di Kepulauan Nias yang juga merupakan masuk kategori kawasan terluar. Sekian terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Makasih Pak Willem, dari meja Pimpinan silakan, Pak Ridwan.

**F – P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Makasih Pak Ketua, untuk waktu saya langsung ke Pak Menteri saja.

Saya sering berkonsultasi Pak Menteri dengan Kepala Balai yang ada di bahkan Anggota-Anggota Bapak dari PUPR di Sulawesi Tenggara di Kendari. Sepertinya kalau ada kelonggaran biaya, mungkin perlu dibangun rusun ASN untuk PUPR di sana. Itu barangkali saya melihat ada tanah yang tersedia di sana ada 1,2 Hektar, Pak. Itu milik dari PUPR itu sendiri, eks kanwilnya dulu eks kanwil PUPR dulu, dulu itu. Sekarang ada tersedia 1,2 Hektar dan barangkali kalau ada kelonggaran, kalau ada kelonggaran untuk bisa dianggarkan rusun ASN di lingkungan PUPR di Sulawesi Tenggara. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Makasih Pak Ridwan, Pak Tamliha silakan.

**F – PAN (H.A BAKRI HM, S.E.):**



Pak Ketua izin nanti, Pak.

**F – PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

**Makasih Pimpinan,  
Pak Menteri dan Para Dirjen yang saya hormati,**

Saya bersama Pak Fadli, Direktur Irigasi berkunjung ke Kalimantan Selatan tepatnya di Amuntai. Dan, ternyata sudah ada irigasi yang dibangun sejak Belanda dibangun Tahun 1932. *Nah*, yang jadi masalah adalah yang menjaga pintu irigasi itu kurus-kurus Pak, bukan kurang makan. Tapi kalau dia mau menutup atau membuka itu butuh waktu kalau mau menutup 4 jam, membuka 4 jam. Sehingga menyebabkan air tidak bisa terkendali dan di situ ada sekitar 2.300 Hektar lahan pertanian yang sudah 5 tahun gagal panen. *Nah*, ini diharapkan Pak Menteri bisa diakomodir pada Tahun Anggaran 2023.

Kemudian yang kedua, kunjungan kerja Komisi V ke Bandar Udara Syamsuddin Noor Banjarmasin. Itu yang jalan akses bandara yang 2,8 Kilometer itu Pak Menteri, sekali lagi saya harapkan bisa di-*handle* oleh APBN. Sebab mengharapkan dari Pemda Provinsi dan Kabupaten agaknya susah sekali ketersediaan dananya.

Kemudian yang ketiga, menyangkut bendungan Riam Kiwa ini kan belum ada tadi saya lihat dalam tayangan itu. Dan, saya sudah kendalanya dengan Menteri Kehutanan saya sudah bertemu dengan Menteri Kehutanan untuk segera meng-APL-kan hutan lindung yang ada di kawasan itu. Dan juga bendungan di Hantakan Pak Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saya perlu sekali karena tiap saat itu banjir Pak, akibat tambang di hulunya menyebabkan banjir tidak terkendali di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bendungan Hantakan itu dengan di Kabupaten Banjar setiap saat selalu banjir karena tidak ada penyangga air yang bisa melakukan resapan di daerah pegunungan itu akibat banyaknya pohon-pohon yang ditebang secara legal maupun secara ilegal.

Terima kasih Pak Menteri.

*Wasalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Makasih, biar selesai dari meja Pimpinan. Sekarang Pak Roberth silakan.

**F – P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati teman-teman Pimpinan, dan  
Seluruh Anggota Komisi V,  
Pak Menteri dan seluruh jajaran,**

Yang pertama saya harus memberikan apresiasi dan terima kasih ke Pak Menteri karena hadiah ulang tahunnya sudah berjalan Pak Menteri, dua jembatan, lagi progres untuk penyelesaian di sana.

Yang berikut Pak Menteri, jalan Depapre saya sangat berterima kasih Pak Menteri ini sudah masuk dan ini sudah jelas akan hadir 2023. Ada beberapa hal Pak Menteri yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, Pak Menteri, ini soal koneksitas antara Kementerian, Depapre salah satunya. Ini ada satu lagi Pak Menteri yaitu di Kabupaten Yahukimo, yaitu antara Kekei-Pepera, ini di Yahukimo ada Sungai A, namanya. Ini di sana saya kira Saudara saya ini tahu pasti ya Pak Wandik ya, itu ada Sungai A itu di Kekei mengarah ke Pelabuhan Pepera.

Pelabuhan ini sudah jadi Pak Menteri sudah diresmikan oleh perhubungan. Saya tadinya pikir PUPR yang buat, ternyata ini perhubungan. Sangat baik dan saya kira itu salah satu bisa menjadi kunci jawaban untuk alur ekonomi untuk ke pegunungan, karena dia masuk dari dekat Asmat. Dan, pelabuhan ini sangat-sangat layak dan sangat baik karena dia ada di depan hulu Sungai dan dia tidak terpengaruh dengan pasang surut. Kalau yang saya lihat yang ada di Lokpon atau di Duga itu, itu sungainya terpengaruh dengan pasang surut. Jadi, kalau kapal barang masuk agak besar, kalau pasang surutnya turun nggak bisa keluar atau nggak bisa masuk, kalau ini tidak.

Yang jadi masalah sekarang teman-teman di Kabupaten Yahukimo itu sangat antusias. Mereka sudah buat sekarang dan sekarang ada progres untuk pengerasan dan pengaspalan sampai ke Sungai A. Itu sudah tembus 20 Kilometer dari Dekai Ibukota Kabupaten. Dari Kekei ke Pepera, itu yang belum Pak Menteri dan ini masuk ada di Kabupaten Asmat. Jadi, Kabupaten Asmat sudah tidak punya kepentingan ini dan tidak mendapat ini jadi tidak mungkin dia akan buat jalan itu. Satu-satunya jalan Bapak yang bisa masuk.

Kemarin saya kira kalau memang itu saya ingin minta untuk Pimpinan Daerah, saya minta jembatan rangkanya mereka buat itu tapi tidak bisa karena lokasinya batas jembatan itu adalah masuk ke Asmat. Jadi, harus melalui Pemerintah Kabupaten Asmat. Maka yang bisa intervensi ke situ satu-satunya Bapak, tinggal 25 Kilo. Maka, jumlah panjang jalannya dari Ibukota Kabupaten Yahukimo sampai ke pelabuhan Pepera itu cuma 45 Kilo, sangat dekat. Jadi, kalau yang lain jauh, Jayapura sampai Wamena itu kan hampir beberapa ratus 600 kali, kilo. Dari Duga yang Lokpon itu sampai ke Wamena itu hampir 300 kilo, jauh sekali.

Kalau kita satu lagi, buka lagi jalan yang akan tembus ke Yahukimo Wamena, itu mungkin sekitar 50-an maka itu terbuka ya kan. Bandara Yahukimo sangat-sangat layak sekarang hampir sama dengan Bandara Wamena. Sebentar lagi Ibukota Provinsi akan hadir di sana Pak Menteri. Jadi,

saya kira ini mungkin harus menjadi satu perhatian khusus Pak Menteri jalan ini untuk pelabuhan karena pelabuhannya sudah jadi nanti saya bisa kasih foto-fotonya Pak Menteri, bagus sekali dibuat sudah bagus tinggal jalan tembusnya ini. Jadi, ini saya kira menjadi perhatian kami, kemarin kami datang bersama Pimpinan Bupati dan Wakil Bupati dan jajaran semua saya melihat itu.

Dan, saya untuk masuk ke pelabuhan itu saya harus dari Timika, maka saya cuma sampai ke kalinya dari Dekai ke Kekei ya, itu yang jalannya sudah sampai mobil bisa tembus ke sana. Tinggal dari Kekei-Pepera itu selesai masalah ekonomi akan sangat berdampak untuk penurunan kemahalan di sana Pak Menteri.

Yang berikut Pak Menteri, saya juga memberikan beberapa catatan penting Pak Menteri tentang pengawasan penggunaan anggaran kita, 2022. Yang pertama, yang beberapa kali sudah saya sampaikan tentang pemenang proyek yang dijalankan di Tahun 2022 dan itu kemarin hasil yang saya lihat di sana sampai saat ini, itu tidak ada progres jalan yang seperti. Kalau kita bicara kepada aturan harusnya sudah ada pemotongan hubungan kerja, sudah harus dilakukan. Jadi, saya minta ini Pak Menteri melalui Dirjen untuk pengawasan dan kebetulan banyak yang ingin saya sampaikan masalah Dirjen Konstruksi itu.

Itu dari tiga proyek jalan yang ada di daerah Kelonyapen, preservasi jalan dua jembatan dua, baru satu saja jembatan itu yang sudah kelihatan akan selesai. Jalan ini sampai sekarang tidak ada progres sama sekali, cuma baru gali selokannya. Jembatan sama, tidak ada sama sekali, itu padahal sudah dari Desember ya, Januari kontraknya sudah jalan. *Nah*, ini saya minta Pak Menteri supaya jangan kejadian-kejadian ini banyak sekali kejadian di daerah kami.

Yang berikut, Pak Menteri ini saya mohon maaf, saya tidak terlalu anti kepada BUMN. Tapi, ini menjadi perhatian kami yang saya selalu berbicara bahwa kalau diberikan kepada BUMN kami di daerah dapat hasil apa? Duit ke sana yang bawa juga kembali ke atas, ya kan. Ada sekarang Pak Menteri di Kerom itu pembukaan lahan, itu nilainya hampir 151 Pagu Anggaran, pemenang itu dengan penawaran menang dengan 147 koma sekian. Kalau kita bicara jujur tentang selalu dibidang ada penawaran sampai 30% yang menang, oke kita sepakat, berarti itu murni tidak ada pengaturan sama sekali.

Tetapi, kalau saya lihat ini dari enam urutan pemenang itu adalah di urutan keenam, penawaran tidak sampai 4%, dibuang cuma 4 koma sekian miliar, dia menang. Ada yang tawar sampai dibuang hampir 20, malah ada yang 30 tapi itu kalah, iya ada apa? Apakah ini benar yang selama ini kita diberikan masukkan, saya punya data lengkap Pak Menteri, ya kan. Dan ingin saya sampaikan kalau memang itu untuk pembinaan pengusaha daerah berikanlah yang sewajarnya oleh BUMN. Dari nilai itu disubkan ke pengusaha daerah konsorsium yang seperti saya sampaikan Pak Menteri, konsorsium pengusaha daerah. Karena BUMN menang ini dengan data alat semua adalah punya pengusaha daerah. Tidak ada investasi dari BUMN ini, sama sekali tidak ada investasi, alat beratnya semua dari daerah, ya kan, diberikan dengan nilai 60 sekian Miliar. BUMN itu tidak kerja, 60 sekian Miliar, berarti ada kan dia menang

yang 147 sekian. Dia cuma kasih menang itu ke sana disub dengan 67 apa 68 Miliar. Bayangin sekian besar itu dibawa semua ke sini.

Kalau kita mau ngomong jujur, ya kan. Ini pembinaan untuk pengusaha daerah seperti apa, ini pemerasan menurut saya Pak Menteri, iya kan. Saya akan bertemu dengan Menteri BUMN nanti tanggal 31 saya sudah minta waktu untuk saya juga. Bukan kami mau menolak BUMN, tapi kalau mau pembinaan pengusaha daerah yang wajar diberikan pada kami. Kenapa ini bisa diberikan dimenangkan dengan begitu besar nilainya, ya kan, tetapi pembinaannya tidak seperti itu Pak Menteri.

*Nah*, ini catatan kami yang paling penting kemarin saya kunjungan reses saya ke sana, saya melihat ini ada hal-hal yang kalau memang itu BP2JK sampaikan selama ini tidak bisa diatur. Menurut saya inilah poinnya bahwa ini ada yang janggal dan salah satu BUMN yang menang itu kalau saya mau jujur komisarisnya adalah salah satu Dirjen yang ada di sini, ada Dirjennya itu yang menang, ya. Jadi, hal-hal ini yang perlu kami sebagai tugas untuk melakukan kontrol, kami ingin supaya ini bisa jalan baik, pengusaha daerah bisa, tidak ribut, berikanlah yang wajar kepada pengusaha-pengusaha daerah ya kan, agar BUMN itu betul-betul menjadi Bapak yang baik memberikan keadilan kepada pengusaha-pengusaha daerah. Kalau begini bagaimana pengusaha daerah bisa, ya kan, ekonomi daerah dibawah separohnya ini yang kerja semua di daerah kita, saya kira itu yang.

Yang berikut lagi, Pak Menteri, ada catatan lagi Pak Menteri. Waktu itu saya sampaikan tentang banjir Pak Menteri, yang di Jayapura ada beberapa bulan apa ya. *Nah*, itu semua sudah ditangani pengusaha daerah semua, tapi sampai ini katanya kemarin saya dikomplain ya kami belum dibayar sampai saat ini. Tolong Pak Menteri menjadi catatan di tempat Bapak, di Dirjen Sumber Air kalau nggak salah ya tempat, itu belum-belum di ya sudah sekian lama ya, nanti saya minta perhatian Bapak untuk bisa. Karena ya itu, apapun apalagi kalau menyangkut teman-teman pengusaha daerah di sana. Kami nih sama Pak Willem nih selalu mereka komplain ke kami, bagaimana kami mau berusaha, kami selalu di seakan-akan didiskriminasi sama saudara-saudara kami dari luar, hak-hak yang harus kami dapat semua diambil ya kan.

Kami susah untuk itu, tapi aturan-aturan yang ada. Makanya menurut saya nanti kami juga meminta waktu Pak Menteri untuk bisa diskusi, ada beberapa hal yang memang kami perlu ada diskresi khusus Pak Menteri, yang harus bisa kita ambil, kita ambil karena sudah ada contoh banyak Pak Menteri. Salah satu bahwa tentang verifikasi kesiapan anggaran apa alat, itu kalau cuma dengan surat semua bisa masuk. Dan itu yang terjadi ya kan, kemarin saya baru didatangi teman-teman dari Merauke. Mereka bilang silakan Ketua, datang ke kami kami akan bawa lihat. Akhirnya proyek itu dibuat tumpang tindih untuk mengamankan yang dulu tidak berhasil lagi ada di sana, dan itu saya akan datang lihat, gitu.

Karena banyak yang tidak masuk akal, ya kan, tapi bagaimana untuk bisa menjaga itu supaya tidak ini, dibuat lagi berikutnya. Berarti anggaran turun di tempat yang hampir sama, ya.

Saya kira Pimpinan, itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf agak banyak, saya kembalikan ke Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik Pak Bakri silakan. Terakhir nanti Pak Sudewo.

**F – PAN (H.A BAKRI HM, S.E.):**

Ya baik terima kasih Pak Ketua.

**Pak Menteri yang saya banggakan saya hormati,**

Kalau teman-teman menyampaikan terima kasih banyak saya juga atas nama masyarakat Provinsi Jambi menyampaikan ribuan terima kasih pada Pak Menteri dan seluruh jajarannya yang sudah mengalokasikan anggaran untuk Jambi.

Saya sudah menyerahkan sebenarnya beberapa catatan-catatan ke masing-masing Dirjen ya, Bina Marga pada bulan Juli, terus Sumber Daya Air pada bulan Juni, Cipta Karya di bulan Juni. Jadi, mohon mungkin tapi tidak masalah nanti akan saya serahkan lagi supaya bisa mengingatkan.

Di Bina Marga mungkin Pak Menteri Pak Dirjen, itu ada satu daerah di Kuala Tungkau itu yang sering terjadi banjir rob. Kalau sudah banjir rob ya sudah rusak semua jalan, itu kebetulan jalan nasional yaitu dari jalan Simpang Semau, Desa Semau ke Kota Kuala Tungkal, itu sudah masuk jalan nasional, itu mungkin perlu menjadi perhatian. Termasuk juga yang dulu Kementerian juga pernah membantu pekerjaan jalan lingkar di kampus UIN. Karena tahun depan itu UIN akan mengadakan pagelaran internasional. Nah, saya juga berharap mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan. Termasuk juga pelebaran jalan di dalam Kota Tebo, Sarowangun, dan lain-lain, itu di daerah, di wilayah Bina Marga.

Kalau di Sumber Daya Air kemarin pada saat rapat yaitu pernah saya sampaikan adalah perlindungan tebing Sungai Batanghari di Desa Pentikalo. Ini tebingnya longsor kalau tidak cepat ditangani mungkin akan mengakibatkan putusnya dua kecamatan di Kabupaten itu. Beberapa hal mungkin terkait juga masalah-masalah lain termasuk masalah dari irigasi apa, daerah Kerawa, terus lanjutan-lanjutan drainase mungkin nanti akan saya serahkan juga Pak Menteri.

Terus yang kedua di Cipta Karya, nah, di Cipta Karya ini ada sedikit menjadi perhatian Pak Menteri. Tahun 2021-2022 ini memang ada bantuan prasarana pendidikan sekolah rehabilitasi. *Nah*, dari sekian banyak yang direhabilitasi itu rata-rata bangunan itu tahun 80-an. *Nah*, gedungnya sudah selesai hari ini bisa kita lihat, bukan main dengan warna merah putih. Tapi *meubeler*-nya Pak, maklum pada saat rehabilitasi itu terkadang-kadang pihak sekolah maupun rekanan itu tidak bisa mengamankan. Sehingga anak-anak itu

seakan-akan belajar gedung yang baru, lantainya bagus tapi belajarnya di lantai, karena *meubeler*-nya rusak.

*Nah*, saya berharap juga mudah-mudahan ini bisa disamakan dengan pembangunan rusunawa atau pondok pesantren. Jadi, mereka dapat gedung baru, *meubeler*-nya baru. Sehingga pada saat mereka masuk itu sudah tinggal duduk manis sehingga belajar dengan tenang. Itu mungkin menjadi catatan di saya, juga termasuk juga ada kawasan Geopark itu yang juga perlu jalan. Itu saja mungkin Pak Menteri, Pak Ketua, terima kasih. Nanti akan saya serahkan.

*Wabillahitaufik Walhidayah.*

*Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**F – P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

*Walaikumsalam.* Mau serahkan apa? Sekarang? Nanti? Makasih. Pak Dewo silakan terakhir ini Pak Dewo.

**F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Terima kasih Pimpinan.

***Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,***  
**Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua,**

**Pak Menteri dengan seluruh jajarannya yang saya hormati,**

Ini memang layak untuk saya sampaikan pada rapat kerja kali ini, rasanya kurang pas kalau harus saya sampaikan pada saat RDP dengan Dirjen. Karena terkait dengan manajemen yang dijalankan dengan kementerian, oleh Kementerian PUPR. Maka pertanyaan saya adalah kepada Pak Menteri pada forum raker kali ini.

Pak Menteri pasti ada niatan dan sepakat dengan kita semua, sepakat dengan harapan seluruh rakyat bahwa pelaksanaan konstruksi harus memberikan satu kepastian, kualitas pekerjaan itu bagus. Pasti Pak Menteri, saya melihat ada upaya konkrit untuk itu, seperti bagaimana sistem pengadaan barang dan jasa. Pak Menteri konsen betul terhadap penawaran yang di bawah 80% harus dilakukan verifikasi secara khusus, ini artinya merupakan upaya konkrit.

Namun demikian, masih ada satu PR yang harus saya memberikan masukkan kepada Pak Menteri. Dari kontrak tersebut dengan angka yang bagus, bisa dibilang nilai kontraknya di atas 90%, tolong tidak disia-siakan implementasinya. Coba dicek betul, dikonfirmasi secara faktual, ya secara faktual mungkin Pak Menteri perlu ada instrumen khusus yang di luar daripada tupoksi struktur. Supaya Pak Menteri bisa paham bisa tau bagaimana kondisi *real* dalam pelaksanaan konstruksi di masing-masing program, di masing-masing proyek dan di masing-masing *item*.

Apakah itu di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya atau Perumahan. Ini tergantung bagaimana seni dan ilmunya Pak Menteri PU, supaya bisa tau kondisi *real* pada saat pelaksanaan konstruksi. Tidak hanya sekedar laporan secara normatif.

Karena menurut pengamatan kami dan saya yakin itu tidak meleset, ya tidak meleset, andai kata pun meleset hanya sedikit sekali. Bisa dibilang ini adalah valid bahwa hampir semua pekerjaan, hampir semua pekerjaan itu tidak ditangani, tidak dikerjakan langsung oleh pemenang tender. Tidak dikerjakan sendiri oleh pemenang tender. Angka tereduksi begitu signifikan bilamana pekerjaan itu tidak dilaksanakan sendiri oleh pemenang tender. Saya tidak berbicara itu BUMN atautkah non-BUMN, fakta di lapangan seperti itu.

Subkonstruksi bukan kategori melanggar peraturan perundang-undangan. Tetapi, sub-konstruksi itu ada satu kriteria tertentu. Tetapi yang terjadi hampir semua pekerjaan, hampir semua pekerjaan yang tidak dalam kategori untuk disubkon-kan. Misalnya dengan tuntutan teknologi yang tinggi, misalnya dengan tuntutan sumber daya manusia yang tinggi. Tetapi, hampir semua jenis pekerjaan atau sub-sub pekerjaan *sub-item sub-item* itu adalah disubkon-kan dikerjakan oleh pihak yang lain. Tidak ada masalah, tidak ada masalah sepanjang memang itu memenuhi kriteria.

Tapi kalau yang terjadi selama ini, betul tidak akan bisa menjamin kualitas pekerjaan itu menjadi bagus. Jadi upaya Pak Menteri yang dari hulu sampai ke hilir, dari hulu tentang kebijakan bagaimana pelaksanaan tender. Saya mencermati pelaksanaan tender, ada satu perubahan-perubahan, ada satu sistem yang dijalankan ke arah perbaikan, ke arah perbaikan. Saya tidak mengkritisi lagi soal bagaimana pelaksanaan tender. Tetapi saya mengkritisi bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Konsisten nggak dengan segala semua persyaratan, dokumen-dokumen yang dalam tender itu diimplementasikan di lapangan, konsisten atau tidak? Karena seluruh dokumen dalam tender itu sampai bisa menggugurkan dan juga bisa untuk memenangkan bahwa dokumen itu merupakan satu persyaratan mutlak yang tidak bisa ditawar, tapi bagaimana konsistensinya persyaratan dan dokumen itu untuk di lapangan.

Kalau pekerjaan tersebut dikerjakan oleh pihak lain bukan pemenang tender dipastikan bahwa dokumen dan persyaratan itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, jadi hanya hitam di atas putih. Maka banyak sekali pekerjaan, maka banyak sekali pekerjaan yang hanya benderanya saja tapi pelaksanaannya adalah pihak lain. Tidak persoalan di Kabupaten A di luar pulau dia yang menang, nggak persoalan. Karena memang tidak ada batasan untuk itu, harus daerah tapi bagaimana konsistensinya itu.

Jadi saya mohon ini memberikan masukkan saja kepada Pak Menteri, bagaimana Pak Menteri punya instrumen dan bagaimana punya seni dan ilmu supaya hal yang demikian di lapangan itu, apa yang saya sampaikan dikonfirmasi, dicek benar atau tidak, yang saya sampaikan. Kalau dikata ada kebenarannya tolong bagaimana mengatasinya, karena untuk menjamin pekerjaan tersebut berkualitas.

Kemudian yang kedua, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris BPJT, di media. Bahwa akibat dari pelayanan jalan tol sekarang ini, negara mengalami kerugian sebesar 4,4 Triliun di tiap tahunnya utamanya diakibatkan oleh masalah kemacetan dan masalah pelayanan dan pembayaran di pintu tol.

Ini nanti, Pak Menteri izin saya akan melakukan diskusi secara mendalam dengan BPJT, tidak saya sampaikan di sini. Tapi yang ingin saya sampaikan sebagai diskresi dari apa yang saya sampaikan terkait dengan kerugian negara akibat kemacetan. Mengapa itu hanya dilakukan di ruas jalan tol? Jalan nasional arteri non-tol di mana-mana terjadi kemacetan. Dilakukan penelitian terhadap hal ini kerugian negara itu berapa dan bagaimana nanti solusi manajemennya bagaimana. Saya ini sehari-hari Pak, kena dampak daripada manajemen yang tidak benar.

Pekerjaan jembatan di Semarang-Demak, itu sampai macetnya berjam-jam berkilo-kilo meter, putar-putar harus kampung. Ini mengapa nggak ada manajemen pada saat pelaksanaan konstruksi pun supaya tidak berdampak terhadap kemacetan yang separah ini. Dan berapa jembatan yang dibangun di seluruh Indonesia itu tidak hanya dalam satu titik, itu terjadi di mana-mana, mengapa nggak ada manajemen. Karena *outcome* daripada pekerjaan konstruksi itu adalah bagaimana memberikan atau menjamin kelancaran berlalu lintas. Bukan hanya bagaimana kita bisa mewujudkan jembatan, bagaimana kita bisa mewujudkan satu konstruksi jalan. Tapi, jalan jembatan semuanya itu baik masalah pelaksanaan, baik tidak saat pelaksanaan konstruksi, semua lalu lintas itu berjalan lancar.

Dan akibat dari manajemen yang semacam ini, kendaraan masuk ke jalan-jalan kabupaten ke kampung-kampung berdampak pada rusaknya jalan Kabupaten dan jalan desa. Siapa yang bertanggungjawab? Kabupaten tidak akan mampu dengan jalan yang rusak, itu di kampung saya di Pati.

Kemudian, yang terakhir ini mohon maaf Pak Menteri, sebenarnya banyak sekali yang saya siapkan untuk saya pertanyakan dalam forum ini. Mengingat karena sudah berjalannya lama, ya Pimpinan saya tahu dikedip-kedipi oleh Pak Lasarus. Saya hanya fokus saya dapat titipan dari Bupati Grobogan.

Pada waktu kemarin, Komisi V kunjungan spesifik di sana, hadir semua struktur Kementerian PUPR di Kabupaten Grobogan. Maka hasil daripada kesepakatan kunjungan spesifik antara Bupati Grobogan dengan Komisi V dan juga dengan Pemerintah Kementerian PUPR akan saya sampaikan sekarang ini. Mohon nanti difoto karena harus saya laporkan kepada Bupati Grobogan sebagai sportivitas saya terhadap beliau. Meskipun beliau adalah Ketua DPC PDI-Perjuangan ya. Nggak jadi masalah, saya Gerindra.

Kemudian, kemarin Pak Menteri saya laporkan. Saya sudah WA kepada Pak Dirjen Perumahan. Di sana di kampung saya Kabupaten Pati, ada banjir Pak, banjir besar melenyapkan banyak rumah. Tapi ada 10 rumah yang



memang hilang lenyap Pak, yang punya rumah itu belum punya, masih numpang kepada warganya. *Alhamdulillah* mendapatkan atensi.

**KETUA RAPAT:**

Mas.

**F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Dari Dirjen Perumahan untuk diberi rumah khusus.

**KETUA RAPAT:**

Mau diserahkan sekarang silakan mas.

**F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Sekarang Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Iya.

**F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Ini cara Pimpinan memang memotong saya begini, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Silakan mas. Iya yang mau menyerahkan selain Pak Dewo ya, silakan. Karena Pak Menteri harusnya sudah jalan ini. Kita aduh, silakan. Iya Pak Hamka tadi silakan, Pak Hamka.

**F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):**

Saya antar dulu Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Iya.

**F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Nama saya Sudewo, Pak.

**F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):**

Izin Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Hamka silakan.

**F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):**

Saya mengantar dulu Pak Menteri izin. Saya kebetulan kemarin menerima surat dari Bupati Nias Utara kebetulan RDPU di sini. Saya mewakili teman-teman untuk menerima suratnya dan saya harus sampaikan kepada Pak Menteri.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak. Ya, Pak Roberth ya terakhir silakan.

**F – P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Iya saya tambah sedikit Pak Ketua dan Pak Menteri.

Saya laporkan juga ke Pak Menteri bahwa kemarin reses kemarin Pak Menteri saya sudah melakukan apa yang selama ini saya janji sama Pak Menteri. Kami buat kampung baru Pak Menteri, itu kami sudah peletakan batu pertama di sana. Mungkin nanti balai perumahan kami di sana, saya minta untuk nanti lapor ke Pak Menteri mungkin sudah lapor apa belum ya. Jadi, bersama masyarakat kemarin Pimpinan Daerah juga hadir. Lokasinya dari Kantor Bupati tidak lebih dari 1 Kilo, mungkin sekitar 600 Meter. Itu benar-benar kami bangun dari 0, kami tata itu kampung semua hasil daripada kampung itu prosesnya dari BSPS.

Memang kalau lihat nilainya Pak Menteri, tidak mungkin bisa dapat rumah seperti itu, kita hitung jatuhnya sekitar hampir 40-50. Tapi itulah semangat kita, kebersamaan kita, kami coba bersama-sama dengan Anggota DPR Provinsi Papua, untuk kami nyatukan program itu menghadirkan satu contoh perkampungan dan kita ingin Kementerian PUPR menjadi ujung tombak untuk nanti semua fasilitas. Cuma ini kemarin ada *miss* komunikasi dengan Cipta Karya, kemarin di Kerom. Tolong Ibu, itu sudah kami sosialisasi semua di sana lokasinya dengan kepala kampung, kepala ini semua, tiba-tiba dipindahkan.

Ini yang masih terjadi di daerah kami, ya Kepala Balai di sana dan jajarannya di bawah itu masih anggap bahwa ini punya kementerian maka mereka bisa seenaknya pindahkan tanpa memberi tahu kita, pihak dari Balai Cipta Karya.

Teman-teman saya di sana sudah rapat semua sudah ini tiba-tiba pindah, Kerom ya di Kerom. Ya untuk KOTAKU, iya, itu kami sudah siapkan semua dan bukan cuma itu, itu di Yahukimo pun demikian, ya kan masih seperti itu. Kami sudah minta itu di sana dengan Pimpinan Daerah semua sudah setuju tiba-tiba dirubah tempat lokasinya. Ini yang membuat masalah yang kami

hadapi, kami minta sekali lagi. Tolong Ibu Dirjen melalui Pak Menteri, tolong melihat kembali keberadaan teman-teman yang di sana, ini.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, bisa dipersingkat. Ya, saya rasa cukup ya.

Ya baik, Ketua ke bagian terakhir ini, Pak Menteri mudah-mudahan singkat. Ya, terima kasih Pak Menteri.

Saya sedikit saja Pak kalau ke Dapil saja langsung Pak Menteri. Ini program pengentasan banjir di Kalimantan Barat yang kemarin pernah terjadi Sintang. Kita ada penanganan Sungai Melawi-Kapuas Pak, ya. Mudah-mudahan ini bisa di tindaklanjuti dengan program lanjutan, Pak. Karena yang kemarin kalau saya lihat *Geotech Geobag* itu mungkin tidak menyelesaikan masalah, tapi nanti mari kita lihat lah Pak ya. Karena kemarin sempat air naik sedikit Pak Menteri, lolos semua Pak airnya melewati *Geotech Geobag* yang sudah kita bikin kemarin. Saya kebetulan waktu air naik melampaui *Geotech Geobag* itu saya datang ke situ.

Kemudian program yang bendungan itu Pak, yang di Melawi, ya mudah-mudahan ini lanjut walaupun mungkin fisiknya kita belum secepatnya bisa kita kerjakan, tapi proses perencanaan dan seterusnya mungkin bisa kita tindaklanjuti sebagai jawaban atas kunjungan kita bersama tempo hari termasuk kehadiran Pak Presiden di sana. Dan, mudah-mudahan banjir serupa tidak terulang kembali. Tapi, memang kalau ini tidak ada upaya-upaya dari kita, pasti biasanya ada siklus ya, Pak. Dan, saya berharap sebelum siklus ini nanti mutar, yang bisa kita antisipasi sudah bisa kita tangani.

Kemudian, yang *urgent* juga ke SDA Pak Dirjen, Pak Menteri. Ada beberapa kecamatan di Kalbar itu Pak, termasuk di Dapil saya yang masih belum punya air bersih Pak, Ibukota kecamatan ini. Kita sudah usulkan beberapa waktu lalu ya, lewat forum ini pun pernah saya sampaikan suratnya, kemudian kepada Kepala Balai juga ya. Dulu pernah diajukan contoh di Kecamatan Binjai Pak, dulu, sudah kita ajukan. Kemudian ke Tungau Hilir namanya itu daerah ke arah perbatasan, Ibukota kecamatan juga tidak ada sarana air bersihnya Pak. Ya tidak ada sarana air bersih ini memang betul-betul tidak ada, Ibukota kecamatan loh Pak. Bahkan ada beberapa kecamatan yang lain, data lengkap di balai Pak, lengkap di balai.

Kemudian ke Cipta Karya Bu, ada beberapa lokasi SPAM Bu ya, juga kita ada usulkan, nanti akan detail akan saya sampaikan pada saat nanti raker. Soal jalan saya lihat di program Pak Menteri tadi memang menuju ke penuntasan paralel perbatasan itu memang *urgent* Pak. Lintas tengah itu menurut saya tinggal dilanjutkan saja yang Sanggau-Sekadau, kemudian Sekadau-Sintang, Sintang-Putusibau itu yang jalan masih sempit sekali. Nah, mudah-mudahan program ini tetap lanjut ya. Saya rasa yang lain-lain tadi Pak Syarif sudah sampaikan soal tol dan seterusnya saya rasa sudah ya.

Saya rasa demikian, sebelum kita menuju ke kesimpulan rapat Pak Menteri. Saya akan menyerahkan secara resmi yang tadi saya sampaikan usulan dari teman-teman komisi terkait program apa, Padat Karya dan hasil kunjungan kerja spesifik dan kunjungan kerja Komisi di masa persidangan kelima. Nanti juga akan kita serahkan, ini bagian yang tidak terpisahkan dari, nanti tinggal dikompilasi saja dengan program yang berjalan di Kementerian.

Saya minta semua Pimpinan silakan ke depan Pak, kita untuk menyerahkan kepada Pak Menteri.

Karena keterbatasan waktu Pak Menteri juga mesti ikut di sidang Kabinet ya, kita langsung ke kesimpulan rapat. Saya langsung saja ke draf kesimpulan Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tanggal 25 Agustus 2022.

1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR terhadap Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk mempertahankan capaian kinerja dan opini tersebut di tahun-tahun mendatang.

Ini harus kita kasih *applause* Pak.

2. Komisi V DPR RI meminta untuk meningkatkan capaian serapan APBN Tahun 2022 sesuai saran dan masukkan Komisi V DPR RI, di mana capaian per bulan Agustus 2022 sebagai berikut:  
Realisasi Keuangan 41,07% dan Realisasi Fisiknya 46,94%
3. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kementerian PUPR terhadap alokasi anggaran Kementerian PUPR dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor S-617/MK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 sebagai berikut. Pagu Kebutuhan Rp159.611.866.100.000 Di Nota Keuangan RAPBN Tahun 2023 ya, yang terakhir dari dua surat yang tadi di atas berjumlah Rp125.217.457.471.000 Sehingga masih ada *backlog* Rp34.394.408.629.000
4. Selanjutnya, Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian PUPR akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai Pagu Kebutuhan melalui mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN di DPR RI.

Komisi V, setuju?

**F – P. DEMOKRAT (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.):**

Pimpinan, kok substansi perbedaan pendapat kita kok nggak masuk? antara kan perbedaan tadi kan sebelumnya itu kan tidak 125 kan? Harusnya itu ditulis, supaya nanti itu tidak menjadi yang tadi pendahuluan awal. Yang ketok kan bukan 125, yang 125 ini kan yang terakhir kan? Ada selisihnya kan? sebelumnya kan yang kita tetapkan bukan 125. Harusnya itu masuk sehingga Pimpinan Komisi menyurati. Sehingga itulah, awal pertama tadi loh harus masuk dalam kesimpulan itu.

**KETUA RAPAT:**

Nah, jadi jadi gini.

**F – P. DEMOKRAT (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.):**

Gitulah kira-kira.

**KETUA RAPAT:**

Baik-baik. Saya pahami Pak Jhonni sampaikan. Karena kesimpulan rapat kita yang kemarin Pak, yang perhubungan kan persis seperti ini. Nanti berdasarkan kesimpulan, ini sebetulnya ada dua surat sudah, ini kan ada SK dari Bappenas ini. Keuangan, nih ya saya baca di poin tiga nya. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kementerian PUPR terhadap alokasi anggaran Kementerian PUPR dalam RAPBN Tahun 2023 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas. Nomor, ada dua surat nih Pak, surat pertama dan surat kedua. Nah, ini kan sumbernya udah ada sebetulnya ini dari Pemerintah, surat pertama dan surat kedua. Nah surat pertamanya yang kemarin kita tetapkan gitu kan Pak ya dan surat keduanya itulah yang berjumlah hari ini.

Jadi menurut saya Pak Jhonni ini saran saja, tadi saya sudah diskusi juga dengan Ibu Kepala Sekretariat, Bu Kepala Sekretariat pun sudah diskusi juga dengan Badan Anggaran. Buat saja kesimpulan seperti yang kemarin nanti kita susulkan suratnya ke sana, gitu Pak Jhonni, sudah kita diskusikan dengan Badan Anggaran.

Cukup ya? Setuju ya? Baik kita ketok nih.

**(RAPAT: SETUJU)**

Baik Pak Menteri, izin Pak Menteri setuju? Setuju, baik.

**(RAPAT: SETUJU)**

Baik, dengan demikian selesailah rapat kita pada hari ini.

**F – P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Ketua, Ketua, sebelum tutup Ketua, terakhir. Bahan yang tadi kita sudah sepakat yang kita serahkan ke Pak Menteri untuk jawabannya nanti hari Senin Ketua. Iya.

**KETUA RAPAT:**

Baik.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc.):**

Mohon izin, Bapak.

**KETUA RAPAT:**

Iya silakan Pak Menteri. Iya.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc.):**

Terima kasih,

**Pimpinan dan Ibu-Bapak Anggota Komisi V DPR RI.**

Pertama saya ingin ucapan terima kasih kepada Bu Cen, durian musang king-nya Bu. Tadi sudah bikin adem kita ini.

Yang kedua, daftar Padat Karya ini, pasti ini menjadi super prioritas kami untuk kami segera evaluasi. Tapi kami mohon waktu tidak mungkin hari Senin, ini sudah hari Kamis. Ya Bu jadi tidak mungkin hari Senin, mungkin satu minggu. Ya oke.

Yang lainnya Bapak karena tadi ini progresnya 41% ini ada juga pertanyaan tentang Asosiasi Kontraktor dan juga Pak Roberth tadi karena ada yang macet. Ini memang karena ada tadi yang persis Bapak Syahrul, kenaikan BBM dan aspal terutama. Ini sudah ada kebijakan dari Pak Menko Perekonomian memang akan dibawa ke ratas juga, tapi sudah ada notulen rapatnya dan kami sudah sampaikan pada semua kontraktor. Bahwa akan ada eskalasi untuk penyesuaian bahan bakar ini.

Caranya, caranya nanti proyek-proyek PUPR mengambilnya langsung ke Pertamina, Pertamina akan mengonkolan marginnya. Waktu itu kita bahas, kami mohon kalau bisa seminimal mungkin 15 atau 16.000. Tapi karena pada saat tender itu sekitar 11 sampai 12.000. Jadi kalau Pertamina nanti bisa turun, semaksimal mungkin sisanya ini *gap*-nya akan dibayari oleh DIPA PU. Jadi semua *sharing the bourden*, dengan kepastian itu pun sekarang sudah mulai bergerak. Jadi, memang ada kelambatan karena kenaikan BBM industri, bukan

subsidi. Tapi nanti ngambilnya langsung ke Pertamina, jadi ini sudah ada kebijakan untuk itu Bapak.

Mohon maaf ini saya harus respon juga tentang bencana alam yang belum dibayar. Bapak, kalau bencana alam ini memang ada mekanismenya, pasti dikerjakan dulu nanti diverifikasi BPKP, kalau oke kalau itu dari DIPA PU langsung dibayar. Tapi kadang ada juga uang dari BNPB sehingga harus ada BNPB ke Menteri Keuangan baru bisa keluar DIPA-nya, itu butuh waktu. Tapi yang penting pasti harus verifikasi BPKP.

Sebagai contoh untuk yang SDA saja untuk bencana alam seluruh Indonesia, itu kita punya utang 450 Miliar, yang 230 Miliar sudah dibayar, yang 220 baru verifikasi BPKP ya Pak. Jadi ini ada mekanismenya, karena itu pasti belum ada di DIPA. Kan kita tidak merencanakan bencana, jadi tidak ada di DIPA, itu hanya gelondongan dana darurat. *Nah*, untuk *nyuil* dana darurat itu harus BPKP jadi ada progresnya, tapi pasti dibayar.

Yang terakhir mohon maaf Pak tentang Kirom, Kirom ini sudah lelang ulang ya kan Pak, dan kalau Bapak bilang ini dimenangkan, saya akan proses ini Pak, *ndak* ada dimenangkan itu. Mohon maaf Bapak, saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjaga ini. Tapi kalau tadi Bapak bilang ini kok dimenangkan, nah kalimat di itu bahaya. Saya akan turunkan Irjen, yang dulu kan sudah kita ganti atas usulan Bapak. Jadi kalau dia masih main-main gini mau saya ambil tindakan. Makasih Bapak.

**F – P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Boleh tanggapan sedikit?

**KETUA RAPAT:**

Baik.

**F – P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Saya rasa nggak perlu diulas lagi Pak Roberth

**F – P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Untuk yang

**KETUA RAPAT:**

Nggak perlu diulas lagi.

**F – P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Yang pertama Pak ini soal Lumiang.

**KETUA RAPAT:**

Sudah terlalu panjang ini.

**F – P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Tidak, jadi Pak Menteri kalau saya sepakat sekarang ini adalah ekonominya kita dengan penambahan itu. Tapi yang kendala yang saya lihat dan itu yang menjadi kendala saat ini dari awal. Bahwa pemenang itu tidak punya aspal *plain*, tidak punya apa, kalau ada itu berarti bisa jalan Pak Menteri. Dan peralatan itu tidak ada sama sekali, itu yang membuat proyek itu sampai saat ini tidak ada maju-maju pembangunannya.

Kalau itu ada punya *stone crusher* sebagai untuk batu pecah dan sebagainya pasti jalan, dan itu tidak punya peralatan itu yang saya ingin sampaikan. Bukan masalah kenaikan bahan bakar maka dia terkendala Pak Menteri. Karena saya langsung di lokasi saya melihat itu. Jadi ini yang saya ingin kasih catatan penting Pak Menteri, supaya itu bisa di ini. Saya terima kasih Pak Menteri.

**KETUA RAPAT:**

Pak ini apa maksud ini. Baik, nanti kalau Bapak tepukin Pak Roberth ngomong lagi nggak selesai-selesai kita. Ada yang senang ditepuhin kadang-kadang Pak.

**ANGGOTA KOMISI V DPR RI:**

Tepuk tangan supaya cepat pulang ket

**ANGGOTA KOMISI V DPR RI:**

Katanya sampai malam.

**KETUA RAPAT:**

Baik.

Pak Menteri pertama kita mengapresiasi Pak, eskalasi harga itu memang harus kita pikirkan ya. Ini banyak yang tadi waktu penawarannya sekian, tiba-tiba waktu kontraknya berjalan harga barang sudah sekian. Ini kalau misalnya kontraktornya pada bangkrut juga tidak baik juga buat kita, Pak. Jadi negara memiskinkan warganya, kan gitu jatuhnya.

Jadi saya rasa eskalasi harga itu bukan sesuatu yang haramlah untuk kita lakukan, demi kebaikan bersama. Karena kalau kontraktornya bangkrut gak mampu bayar tenaga kerja Pak. Jadi, orang yang sudah kerja kagak



dibayar ya tambah banyak orang yang miskin. Ini saya rasa eskalasi harga itu, saya yakin ya seluruh Anggota Komisi V itu mendukung, betul nggak Pak?

Iya kita dukung Pak Menteri. Secara politik kita dukung untuk penyesuaian harga terkait dengan eskalasi harga yang terjadi yang sudah luar biasa sekarang. Besi ningkatnya gila-gilaan, BBM nggak usah cerita lah apalagi kalau sebentar lagi Pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM. Tapi saya yakin secara teknis Kementerian sangat paham. Kami hanya menyampaikan Komisi V DPR RI yang membidangi masalah infrastruktur sepenuhnya mendukung kebijakan Pak Menteri terkait dengan penyesuaian eskalasi harga.

Ini perlu kami tegaskan Pak, sebagai dukungan moril kepada Pak Menteri untuk mengambil kebijakan untuk menyelamatkan dunia usaha kita secara keseluruhan.

**Terima kasih,  
Bapak Ibu sekalian,**

Demikian rapat kita pada hari ini. Saya atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V menyampaikan terima kasih Pak Menteri, dengan segenap atensinya kemudian kesediaan waktu untuk hadir pada saat ini dan mementingkan kami daripada ke istana duluan untuk hari ini, ya. Mungkin kalau rapat ratasnya masih berlangsung Pak Menteri bisa langsung ke sana selesai rapat ini ditutup.

Dan, sekali lagi mohon maaf manakala dalam rapat ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebelum saya akhiri, Pak Menteri saya kasih kesempatan untuk menyampaikan kata-kata penutup.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc.):**

Terima kasih, Pimpinan.

**Ibu-Bapak Komisi V DPR RI yang terhormat dan saya hormati,**

Atas nama teman-teman semua Kementerian PUPR kami juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan di komunikasi kami. Makasih.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik kita kasih *applause* kita semua.

**Terima kasih, Pak Menteri dan Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V,**

Dengan demikian selesailah rapat kita pada hari ini. Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*, rapat ini saya nyatakan selesai dan ditutup.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.00 WIB)**

**JAKARTA, 25 Agustus 2022**

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

**NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.**  
**NIP. 196912021998032002**